

Bab 5

Perlawanan: Sebab, Persiapan dan Bentuk

Bab ini menguraikan empat hal sesuai dengan perumusan masalah yang telah di paparkan pada bab terdahulu. Keempat masalah yang akan dijawab adalah apa saja yang menjadi dorongan dominan setiap tindakan reaksi ex PKL Taman Surya; apa saja yang dipersiapkan PKL dalam melakukan setiap tindakan perlawanan; apakah perlawanan merupakan perlawanan yang terorganisasi atautkah perlawanan tidak terorganisasi dan bagaimana gambaran bentuk-bentuk perlawanannya. Kutipan-kutipan wawancara dari informan dicantumkan untuk mendukung deskripsinya.

Dorongan Perlawanan: Tergusur Pelan-Pelan

Setelah ada krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah PKL di Taman Surya meningkat tajam. Kalau sebelumnya di Taman Surya masih banyak tempat yang kosong, sejak pasca krisis lahan yang tersisa semakin berkurang, sebaliknya jumlah PKL meningkat. Setiap jengkal tanah di Taman Surya mulai di penuh dengan aneka barang dagangan yang diajakan para PKL. Diperkirakan setelah ada krisis kira-kira tahun 2000 jumlah pedagang di Taman Surya mencapai kurang lebih 1000 PKL. Salah satu koordinator PKL di Taman Surya sebelah Timur yang bernama Pak Ponimin pernah menghitung seluruh jumlah PKL. Ketika diwawancarai Pak Ponimin sempat Berkata:

"...saya sempat menghitung sendiri pada awal krisis jumlah PKL di Taman Surya mencapai sekitar 1000 pedagang..."

Semua sisi Taman Surya dipenuhi dengan PKL yang menjajakan berbagai barang dagangan (deskripsi PKL di Taman Surya ad di Bab 4). Seakan waktu itu tidak ada celah yang tersisa sebagai ruang terbuka yang bebas dari PKL. Kalaupun ada hanya untuk lewat orang yang mengunjungi Taman Surya. PKL di Taman Surya tidak hanya menempati bagian yang terbuat dari *paving* tetapi juga menempati lahan yang ditanami rumput untuk memperindah Taman Surya. Akibatnya tak sedikit lahan yang berumput sebagian mati dan kelihatan tanahnya.

Bagi pedagang seperti Pak Ponimin dan pedagang yang sudah ada sebelumnya, kehadiran PKL lainnya di satu sisi bukan menjadi masalah yang perlu dirisaukan. Tetapi justru kehadiran PKL lainnya menjadi magnet tersendiri yang menyedot pengunjung untuk datang ke Taman Surya. Apalagi bagi Pak Ponimin, PKL lainnya yang datang belakangan tidak ada satupun yang berjualan barang yang sama dengannya, yaitu berjualan buku-buku agama. Di Taman Surya sebenarnya ada tiga pedagang yang berjualan buku. Tetapi yang berjualan buku-buku agama hanya Pak Ponimin. Dua pedagang penjual buku —buku-buku umum— ada di sudut Tenggara Taman Surya. Sementara penjual buku-buku tulis ada di sisi sebelah Selatan Taman Surya.

Karena jumlah PKL di Taman Surya semakin membludak sehingga sulit mengendalikan. Informan yang sempat diwawancarai juga mengakui, semakin banyaknya PKL di Taman Surya akhirnya tidak terkendali. Banyak sisa-sisa makanan yang tertinggal keesokan harinya. Di sisi bagian Barat tak sedikit stan berjualan pakaian sudah dipasang sejak siang tengah hari. Pada pukul 13.00 WIB sudah banyak pedagang yang memasang tempat memajang pakaian dari kayu. Tempat memajang pakaian termasuk kaos atau celana ini tingginya kira-kira mencapai 2 meter dan panjang -- menyamping-- juga 2 meter. Pada saat tempat memajang tempat barang dagangan (*jakrag*) dipasang sebelum jam kantor belum tutup. Pada saat para pedagang mulai memasang alat peraganya, masih banyak pegawai pemerintah kota Surabaya yang belum pulang.

Ketika terjadi peralihan kepemimpinan kota Surabaya dari walikota Pak Purnomo Kasidi ke Pak Sunarto Soemoprawiro (Cak Narto) sempat ada pelarangan bagi PKL berjualan di Taman Surya. Atau dengan kata lain, pada awal Cak Narto menjadi walikota Surabaya, sempat melarang PKL menempati dan berjalan di Taman Surya. Menurut informasi ada surat edaran dari dari Cak Narto, yang berisi pelarangan bagi PKL berjualan di Taman Surya. (tetapi ketika di cari oleh ketua Kopya, surat edaran tersebut tidak ditemukan).

Pada awal-awal walikota Cak Narto, pintu satu-satunya pintu gerbang Taman Surya yang berada di sebelah Timur ditutup sejak siang hari ketika

pegawai kotamadya Surabaya beranjak pulang langsung ditutup dan dikunci. Penguncian pintu gerbang Taman Surya ini tidak seperti biasanya. Pada hari-hari sebelumnya, setelah pegawai pemerintah pulang kerja, pintu gerbang Taman Surya dibiarkan terbuka. Karena itu PKL yang akan menggelar barang dagangannya dengan leluasa memasuki Taman Surya tanpa ada hambatan.

Suatu saat pada sore hari kira-kira jam 16.30 WIB Pak Ponimin dan pedagang lainnya sangat terkejut ketika hendak menggelar barang dagangannya di Taman Surya. Para pedagang yang biasanya menggelar barang dagangannya di Taman Surya tertahan di depan pintu gerbang yang berada di sebelah Timur Balai Kota. Para PKL yang biasanya langsung masuk dan menggelar dagangannya saat itu tertahan di luar pagar Taman Surya. Para pedagang tertahan tepat di depan pintu masuk dengan berbagai barang dagangannya yang ditaruh diberbagai tempat. Ada barang-barang pedagang yang dimasukkan kardus ukuran besar warna coklat, sementara di sisi sebelahnya ada pedagang yang memasukkannya ke dalam *glangsing* warna putih. Sementara pedagang lainnya ada yang membungkus barang dagangannya dengan kain. Kain pembungkus barang dagangan pedagang ini ada yang berwarna hitam, coklat atau biru.

Alat-alat transportasi yang digunakan pedagang dari rumah/tempat tinggalnya yang akan berjualan di Taman Surya juga bervariasi. Ada yang mengangkut barang dagangannya dengan menaruh di sebelah kiri dan

kanan sepeda motor. Selain di kanan dan kiri tak jarang barang dagangan ditaruh di atas jok sepeda motornya. Sementara itu tak sedikit pedagang yang membawa gerobak untuk menaruh barang dagangannya. Ada juga pedagang yang membawa sepeda motor dan sekaligus gerobak. Bagi pedagang yang membawa gerobak dan sepeda motor ini membawa orang lain untuk berjualan, entah itu anak atau istrinya. Ketika pergi atau pulang dari/ke Taman Surya, anak atau istri pedagang duduk di jok bagian belakang, sementara itu gerobaknya di tarik sepeda motornya. Gerobak ini dipegang oleh penumpang sepeda motor yang berada di jok belakang.

Selain itu ada penjual teh botol yang membawa barang dagangannya di atas kendaraan mirip becak yang sudah didesain oleh pabrik minuman dalam botol. Roda kendaraan minuman dalam botol terdiri dari tiga roda dengan ukuran yang lebih kecil dari roda sepeda orang dewasa atau roda becak. Ukuran jari tengah kendaraan roda penjual minuman dalam botol kira-kira 50 centimeter. Ukuran roda itu sama dengan ukuran roda sepeda yang biasa digunakan oleh anak-anak.

Di sudut lain terlihat ada penjual bakso, gado-gado dan nasi goreng menaruh gerobak dorongnya begitu saja di depan pintu gerbang Taman Surya sebelah Utara. Pemiliknya ikut bergerombol bersama pedagang lainnya di sisi sebelah Selatan pintu gerbang. Diantara orang-orang yang berombol itu terdapat para pedagang yang telah lama berjualan di Taman Surya, seperti Pak Jono, Pak Dar, Pak Wanto dan Pak Ponimin. Sementara itu para

pedagang perempuan yang sebagian sudah terlihat tua tampak duduk-duduk di sebelah Selatan dari kerumunan pedagang laki-laki yang sedang berunding dengan sesamanya. Para ibu ini ---pedagang perempuan yang berdagang di Taman Surya seringkali membawa anak-anak yang masih kecil— juga terlihat gelisah terpancar dari muka-mukanya. Pedagang perempuan itu juga terlihat sedang berbicara tentang nasib mereka ke sesama pedagang yang duduk di dekatnya.

Raut wajah para pedagang itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang biasanya dengan wajah ceria menggelar barang dagangannya. Sudah terbayang penghasilan akan diperoleh yang berarti kebutuhan ekonomi khususnya kebutuhan sehari-hari akan dapat dipenuhi, ternyata berubah menjadi ketidakpastian. Jangankan menggelar barang dagangan dan kemudian dibeli oleh konsumen, memasuki Taman Surya saja untuk menuju stannya tidak bisa dilakukan lagi.

Semakin beranjak sore makin banyak pedagang yang tertahan di depan pintu gerbang Taman Surya. Pedagang yang datang belakangan semakin terkejut, karena tak biasanya pedagang belum menggelar barang dagangannya tetapi justru bergerombol di depan pintu pagar. Para pedagang mulai gelisah, di tengah-tengah kerumunan pedagang tak jarang terdengar suara, "*bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, kita tidak bisa masuk kita tidak bisa jualan*". Dari sebelah arah Utara pedagang yang sedang bergerombol, tiba-tiba ada suara "*Ponimin ae sing maju takon nang*

Cak Narto” seru pedagang dengan berbaju coklat lengan panjang. Sementara pedagang lainnya masih saling berbicara sesamanya dengan topik kelangsungan nasib berjualan di Taman Surya.

Di antara kerumunan pedagang itu ada Pak Ponimin –meski masih muda diantara para pedagang Taman Surya— termasuk pedagang yang memiliki kepedulian terhadap nasib sesama pedagang Taman Surya. Karena secara historis Pak Ponimin memiliki sejarah panjang menjadi PKL di Taman Surya. Seluruh saudaranya yang berjumlah 9 orang termasuk dirinya berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga ke jenjang SMA, karena biaya dari hasil berjualan orang tuanya di Taman Surya. Selain itu Pak Ponimin dipandang oleh sesama PKL dapat “berbicara” membela PKL Taman Surya terutama ke pejabat pemerintah kota dibanding pedagang lainnya.

Bersamaan para pedagang bergerombol membicarakan kelangsungan berjualan di Taman Surya, pedagang terus tertahan di depan pintu gerbang Taman Surya tanpa bisa masuk. Pintu pagar Taman Surya tidak hanya di kunci –kalau hanya dikunci para pedagang barangkali bisa meloncatinya— tetapi di jaga oleh aparat dari Dispol PP. Tepat di sebelah dalam pintu pagar Taman Surya yang terkunci terdapat lima aparat Dispol PP berpakaian dinas yang berbadan kekar terus mengawasi pedagang yang ada di luar pagar. Sementara di dekat gedung Balai Kota masih banyak terdapat aparat Dispol PP yang juga siap mengamankan Taman Surya sedang duduk-duduk saling berbicara sesamanya. Aparat Dispol PP yang berada di dekat gedung kira-

kira berjumlah sebanyak 15 sampai 20 orang. Barangkali para aparat Dispol PP yang berada di dekat gedung Balai Kota ini akan segera membantu teman-temannya yang berada tepat di depan pintu pagar Taman Surya membutuhkan bantuan. Para aparat Dispol PP berjaga-jaga untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu para pedagang yang akan menggelar dagangannya di Taman Surya nekat memaksa masuk.

Akhirnya sekitar jam 17.00 WIB, para pedagang yang sedang bergerombol tadi menemukan kata sepakat mendatangi Cak Narto dan bertanya kenapa tiba-tiba pintu pagar Taman Surya. Para pedagang yang sedang bergerombol tadi juga sepakat tidak usah semua menghadap Cak Narto. Para "*pentolan*" pedagang sepakat yang menghadap ke Cak Narto atau walikota saat itu, perwakilannya saja. Setelah disepakati akhirnya menghadap ke Cak Narto di rumah Dinasnya di jalan Sedap Malam yang berada di sebelah Selatan tempat para pedagang bergerombol membicarakan nasihnya di Taman Surya

Setelah perwakilan PKL Taman Surya menghadap akhirnya pelarangan berjualan di taman Surya tidak berlangsung lama. PKL yang berada di Taman Surya pertama kali melakukan unjuk rasa ketika walikota dipimpin Cak Narto. Pada saat itu Cak Narto melarang para PKL berjualan di Taman Surya. Karena larangan ini kemudian menyangkut PKL yang *notebene* termasuk juga kalangan bawah atau miskin akhirnya juga memancing untuk bereaksi dengan cara mendatangi rumah dinas walikota.

Kedatangan para PKL ke rumah dinas walikota, ternyata mendapat respon positif dari orang nomor satu di kota Surabaya. Setelah mendengar keluhan PKL Taman Surya yang waktu itu diwakili oleh kaum wanita/ibu-ibu yang sudah lanjut usia, akhirnya Cak Narto mengizinkan berjualan kembali. Cak Narto sendiri membuka pintu pagar Taman Surya yang sebelumnya di kunci/digembok.

Kelonggaran Cak Narto terhadap PKL yang berjualan di Taman Surya ternyata tidak dapat berlangsung lama. Dalam perkembangannya jumlah PKL yang mengais rejeki di Taman Surya semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah PKL, akhirnya mulai muncul permasalahan seperti Taman Surya yang kotor, kumuh dan rawan kemacetan. Sementara itu Cak Narto yang dulu memperbolehkan berjualan di Taman Surya dan sekaligus sebagai "tameng PKL" mulai sakit-sakitan. Beberapa saat kemudian digantikan Pak Bambang sehingga bagi PKL seakan tidak ada lagi orang yang dapat dijadikan perindungannya.

Semenjak itu keberadaan PKL yang berjualan di Taman Surya tidak lagi sebagai potensi warga kota untuk mengais rejeki atau pendapatan. Tetapi keberadaan PKL di Taman Surya mulai dianggap sebagai salah satu masalah kota yang harus dipecahkan. Karena para PKL di Taman Surya sudah tidak dapat menjaga ketertiban dan kebersihan serta keindahan sebuah taman. Bagi pemerintah kota keberadaan PKL di Taman Surya mulai dianggap sebagai gangguan, karenanya perlu ditertibkan atau ditata.

Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk melakukan penertiban atau penataan PKL di Taman Surya. Menurut kalangan PKL Taman surya, upaya pengusiran secara halus PKL dari Taman Surya sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah kota Surabaya. Pada waktu itu (tahun 2000) kemudian dibentuk Tim Penertiban dan Penataan PKL di kawasan Taman Surya.

Pada tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya menggelar acara pameran yang diselenggarakan Citra Pamerindo di lapangan Taman Surya selama 1 (satu) bulan penuh. Acara pameran itu diadakan dalam rangka memperingati HUT kota Surabaya. Seluruh areal Taman Surya digunakan arena pameran, karena itu bagi PKL mau tidak mau yang selama ini berjualan terpaksa harus keluar dan tidak boleh lagi berjualan di dalamnya.

Semua stand dalam areal Taman Surya diperuntukkan bagi peserta yang mengikuti pameran. Sementara itu bagian Taman Surya yang beraspal yaitu di bagian Utara depan kantor walikota Surabaya dipergunakan sebagai areal untuk parkir.

Selama acara pameran berlangsung sekeliling Taman Surya di beri pagar dari tripleks setinggi kira-kira 2,5 meter yang langsung merupakan bagian belakang dari stan-stan pameran yang ada di dalamnya. Praktis keadaan di dalam Taman Surya tidak dapat lagi disaksikan dari luar atau dari jalan yang ada di sekitarnya. Di bagian sisi Timur dan Barat dari pagar yang terbuat dari tripleks tidak diberi hiasan seperti halnya di bagian sisi sebelah

Selatan. Di bagian sisi sebelah Selatan --yang menghadap jalan Yos Sudarso—dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terkesan di dalamnya ada pameran.

Di bagian Selatan Taman Surya ini pagar arena pameran tidak dibuat dari tripleks begitu saja tanpa diberi hiasan atau dicat. Pagar bagian sisi Selatan Taman Surya dibuat arsitektur bangunan gapura yang besar. Dari sisi jalan Yos Sudarso, Taman Surya bagian tengah seakan-akan terdapat gapura yang indah. Sementara loket dan pintu masuk arena pameran berada di sisi sebelah Utara --depan Balai Kota—Taman Surya. Bagian sisi Utara ini --loket dan pintu masuk--juga dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan indah.

Di arena pameran terdapat dua pintu, yaitu pintu masuk dan keluar. Pintu masuk berada di sisi sebelah Barat sementara pintu keluar berada di sebelah Timur. Sementara itu antara pintu masuk dan pintu keluar --ditengah-tengahnya, berhadapan dengan Balai Kota— terdapat loket untuk membeli karcis. Tempat loket untuk membeli karcis berupa lubang yang hanya cukup untuk memasukan tangan calon pengunjung untuk memberikan uang dan mengambil karcisnya. Semua terdapat sebanyak 10 buah loket untuk membeli karcis.

Di atas tiap-tiap bagian yang berlubang berbentuk lingkaran bagian atasnya ini --tempat menyerahkan karcis dan menerima uang— terdapat lubang berukuran 20 centimeter kali 40 centimeter yang ditutup dengan

kawat kasa berdiameter 1 centimeter. Dari lubang ini biasanya petugas penjual karcis berkomunikasi dengan calon pengunjung pameran. Pintu masuk dan pintu keluar dibuat layaknya pintu masuk gedung yang besar, karena pintu masuk dan keluar ini masing-masing dibuat dengan hiasan gapura di sisi kiri dan kanan.

Selain PKL yang masuk di arena pameran PKL masih diperbolehkan berjualan, tetapi tidak di dalam Taman Surya. PKL masih diperbolehkan berjualan tetapi berada di luar pagar Taman Surya. Waktu itu sekeliling Taman Surya tidak hanya terdiri dari pagar besi yang selama ini membatasinya dengan trotoar pinggir jalan Jaksa Agung Suprpto, Sedap Malam dan Walikota Mustajab. Tetapi sekeliling Taman Surya juga diberi pagar oleh penyelenggara pameran. Praktis di sekeliling Taman Surya menjadi areal baru bagi PKL. Seluruh trotoar di sekeliling Taman Surya pada saat ada pameran dipenuhi dengan PKL baik luapan dari dalam maupun PKL yang dari luar. Dapat dibayangkan ramainya sekitar Taman Surya, padahal sebelumnya di trotoar dan jalan sekitarnya sudah banyak PKL. Sementara sewaktu ada acara pameran harus menampung luapan pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam Taman Surya.

Kendati demikian para PKL akhirnya ada yang berjualan di arena pameran. Tetapi masuknya PKL dalam arena pameran diperlakukan seperti peserta pameran lainnya. PKL yang ingin berjualan di dalam lapangan Taman Surya atau dalam areal pameran harus membeli stand kepada

penyelenggaranya, yaitu Citra Pamerindo. Tentu saja harga yang ditawarkan penyelenggara pameran kepada PKL sama dengan peserta lainnya.

Pak Ponimin, Pak Marno dan Pak Khoiron sebagai perwakilan PKL melakukan negoisasi dengan pihak penyelenggara pameran. Ketiganya meminta agar PKL masih diperbolehkan berjualan di dalam areal pameran. Negoisasi berjalan alot karena ada dua pihak --PKL dan penyelenggara pameran-- yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak PKL bermaksud masuk ke areal pameran seperti pada waktu menempati Taman Surya, yaitu tanpa ada biaya. Sementara pihak penyelenggara pameran orientasinya keuntungan (*profit oriented*). Pihak pameran juga beralasan mengadakan pameran membutuhkan dana yang tidak sedikit. Upaya untuk pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pihak penyelenggara dan mencari keuntungan adalah dengan menjual stand pameran. Karena itu dari pihak penyelenggara pameran yang waktu itu diwakili bagian promosi --informan lupa namanya-- tetap memperlakukan siapa saja yang ingin berjualan di dalam areal pameran harus membeli stand sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan telah banyak terjual. Pada waktu itu harga perstan yang berukuran 3x4 meter dijual sebesar Rp 3 juta dengan fasilitas listrik dan sekat pembatas dengan stan lainnya.

Dari pihak PKL terus terang tidak mampu membeli jika harus membayar harga yang sama dengan peserta pameran lainnya. Negoisasi yang dilakukan Pak Ponimin, Pak Marno dan Pak Khoiron terus berlangsung.

Setelah kedua belah pihak beradu berbagai argumentasi, akhirnya diperoleh kesepakatan yang dirasa merupakan jalan tengah bagi keduanya. Akhirnya di sepakati bahwa PKL diberi luas lahan dengan ukuran 6 meter x100 meter tanpa di petak-petak seperti stan peserta pameran lainnya. Setelah melalui negoisasi yang panjang akhirnya lahan seluas itu dibeli oleh PKL secara borongan, dengan harga sebesar Rp 20.000.000,-. Harga borongan yang diberikan ke PKL diikuti dengan pengurangan fasilitas yang diberikan pihak penyelenggara pameran. Salah satu pengurangan fasilitas adalah soal lampu penerangan di stan pameran. Misalnya listrik untuk peneranganpun tidak diberikan seperti pada stan milik peserta pameran lainnya. Di stan-stan lainnya perstan diberi aliran listrik untuk lampu penerangan antara sebesar 150 watt sampai 200 watt. Sementara stan untuk PKL tidak diberikan penerangan listrik. Stan yang akan ditempati PKL yang berukuran 6x100 meter tanpa ada bangunannya. Para PKL yang ikut dalam arena pameran hanya diberikan lahan yang membentang Barat-Timur di bagian Utara. Lampu untuk penerangan bagi PKL sebagai sarana berjualan membawa sendiri-sendiri. Sedangkan bagi peserta pameran lainnya oleh penyelenggara pameran disediakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti sekat-sekat antar stand satu dengan stand lainnya dan terdapat atap di bagian atas.

Akhirnya di sepakati PKL akan diberi lokasi tersendiri oleh penyelenggara pameran menjadi satu sesama PKL lainnya. Atau dengan

kata lain semua PKL yang ingin berjualan dalam arena Pameran akan dikumpulkan menjadi satu tempat. Harga sewa lokasi akan dipikul oleh semua PKL yang ingin ikut berjualan dalam arena pameran. Pada waktu itu PKL yang ikut berjualan di arena pameran sebanyak 100 orang. Dengan demikian tiap-tiap PKL yang berjualan di dalam arena pameran harus membawar sewa lahan sebesar Rp 200.000,-. Pak Marno termasuk salah satu pedagang yang ikut berjualan selama sebulan di dalam arena pameran. Posisi berjualan Pak Marno di dalam arena pameran bersebelahan dengan Pak Ponimin. Lokasi stannya tepat di sebelah Timur stan Pak Ponimin, sehingga menghadap ke arah Selatan. Pak Marno yang melakukan negoisasi soal harga ke pihak penyelenggara pameran mengungkapkan bahwa:

"....ketika ada pameran tersebut, PKL masih diberi tempat dalam areal pameran. Tetapi stand untuk PKL tersebut diperoleh secara gratis, tetapi juga harus membeli ke penyelenggara yaitu Citra Pamerindo. Setelah ada pembicaraan dengan penyelenggara Pameran, akhirnya PKL diberi lahan di dalam Taman Surya seluas 6x100 meter dengan membeli seharga Rp 20.000.000. Setelah itu stand dibagi-bagi untuk menampung PKL yang berminat berjualan di dalam Taman Surya. PKL yang masuk dan tertampung di stand yang dibeli ke penyelenggara pameran sebanyak 100 orang...."

Pak Ponimin yang turut bernegoisasi juga ikut masuk berjualan dalam arena pameran. Seperti PKL lainnya, Pak Ponimin juga mendapat stan dengan luas yang sama, yaitu kira-kira 2 meter kali 2 meter. Seluruh stan dari pihak penyelenggara dibagi sama ke semua PKL yang ikut dalam arena pameran. Stan para PKL dalam areal pameran berada di bagian Utara yang memanjang Timur-Barat. Stan untuk PKL kemudian dibagi menjadi tiga

bagian. Satu bagian berukuran 2 meter kali 100 meter ditempati sebanyak 50 pedagang. Di depan stand ini --50 pedagang yang berjajar-- disisakan untuk jalan bagi pengunjung selebar 2 meter. Di seberang dari 50 pedagang --berhadapan dan dibatasi jalan pengunjung selebar 2 meter-- berjajar 50 pedagang lainnya. Dengan demikian posisi pedagang dari PKL saling berhadapan satu sama lainnya yang dipisahkan oleh jalan bagi pengunjung pameran selebar 2 meter. Posisi stan Pak Ponimin di dalam area pameran berada di paling ujung sebelah Barat menghadap ke Selatan. Posisi stan Pak Ponimin ada di dekat pintu masuk arena pameran. Dengan demikian dihadapan stan Pak Ponimin masih ada deretan stan PKL yang menghadap ke arah Utara.

Ketika pameran memasuki minggu keempat --atau pameran kurang satu minggu-- ada surat edaran yang ditujukan kepada PKL. Surat edaran yang berasal dari Dispol PP ini berisi bahwa setelah pameran Citra Pamerindo selesai PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan dalam kawasan Taman Surya. Isi surat itu termasuk ditujukan pada PKL yang ikut dalam pameran. Bagi PKL yang ikut pameran, setelah batas waktu satu bulan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak Citra Pamerindo, maka PKL harus meninggalkan tempat dari dalam Taman Surya. Meskipun sebelum ada pameran, para PKL menempati areal Taman Surya yang sebelumnya diijinkan oleh Cak Narto.

Menurut Pak Ponimin waktu itu di kalangan PKL ada yang percaya ada yang tidak tentang informasi bahwa Taman Surya tidak diperbolehkan lagi sebagai tempat berjualan. Namanya orang banyak, ada yang mendapat informasi secara lengkap dalam arti melihat sendiri surat edaran dari pemerintah kota Surabaya ada pula yang menganggap larangan itu hanya isu-isu belaka. Belakangan di ketahui, ternyata pemerintah kota sudah mengagendakan acara lain di Taman Surya. Setelah acara pameran Citra Pamerindo selesai pemerintah kota Surabaya langsung menggelar acara Laris Manis yang diadakan oleh SCTV dan disiarkan langsung. Acara Laris Manis yang disiarkan langsung oleh SCTV ini dipandu oleh presenter Ulfa yang dikenal kocak.

Seperti acara-acara pementasan orkes lagu-lagu dangdut lainnya, acara yang di pandu Ulfa dibanjiri banyak penonton. Seluruh areal Taman Surya dipenuhi oleh penonton. Apalagi acara Laris Manis disiarkan langsung oleh SCTV semakin menarik minat penonton untuk datang dan menyaksikan. Panggung Laris menghadap ke arah Selatan. Posisinya tepat berada di depan Balai Kota. Ukuran panggung acara Laris Manis waktu itu kira-kira 10 meter x 20 meter. Seluruh pendukung acara Laris Manis termasuk para artis, cak dan ning Surabaya dan lainnya yang belum tampil berada di dalam Balai Kota, tepat di belakang panggung. Acara Laris Manis yang diselenggarakan selepas pameran sudah dirasakan PKL sebagai bagian dari pengurusan dari Taman Surya. Pak Ponimin menjelaskan bahwa;

"...bagi saya yang memang selaku PKL yang sebelumnya dipercaya teman-teman mewakili mereka, percaya saja bahwa tidak diperbolehkan lagi berjualan di dalam Taman Surya. Karena saya melihat sendiri surat edaran dari pemerintah kota. Waktu itu edarannya berasal dari Dispol PP, tentu saja atas nama walikota. Larangan para PKL tidak boleh lagi berjualan di dalam Taman Surya ternyata ada maksudnya. Ini strategi pemerintah kota mengusir PKL dari Taman Surya. Ternyata setelah acara pameran Citra Pamerindo selesai, langsung disusul acara panggung Laris Manis dari SCTV. Selesai acara panggung Laris Manis SCTV, praktis areal Taman Surya telah bersih dari PKL..."

Selepas acara Laris Manis yang diadakan SCTV, pelarangan bagi PKL berjualan di Taman Surya belum dicabut. Selepas acara Laris Manis Taman Surya dijaga oleh aparat Dispol PP untuk menghalau para PKL yang akan berjualan. Setiap hari selepas acara Laris Manis di sekeliling Taman Surya ditempatkan aparat Dispol PP yang menjaga agar PKL tidak berjualan di dalamnya. Pintu gerbang pagar Taman Surya juga ditutup dan dikunci. Di sebelah Timur Taman Surya terdapat sebanyak 2 aparat Dispol PP, di sebelah Selatan terlihat 2 orang aparat Dispol PP dan di sebelah barat juga terdapat 2 orang aparat Dispol PP.

Setelah mengetahui bahwa PKL tidak diperbolehkan lagi kembali menempati Taman Surya, maka terjadi kegelisahan diantara PKL. Di kalangan PKL Taman Surya mulai terjadi banyak tanda tanya, apakah betul mereka benar-benar akan diusir dari tempat yang sebelumnya dapat memberikan pendapatan sehari-hari?. Dapat dimaklumi jika di kalangan PKL terjadi gejolak, karena memang berjualan di Taman Surya merupakan topangan pokok untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya.

Kalau dilarang berjualan sama saja mematikan sumber pemasukan para PKL yang sebelumnya dapat "mengepulkan asap dapurnya". Selain itu penghasilan dari berjualan di Taman Surya dapat digunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

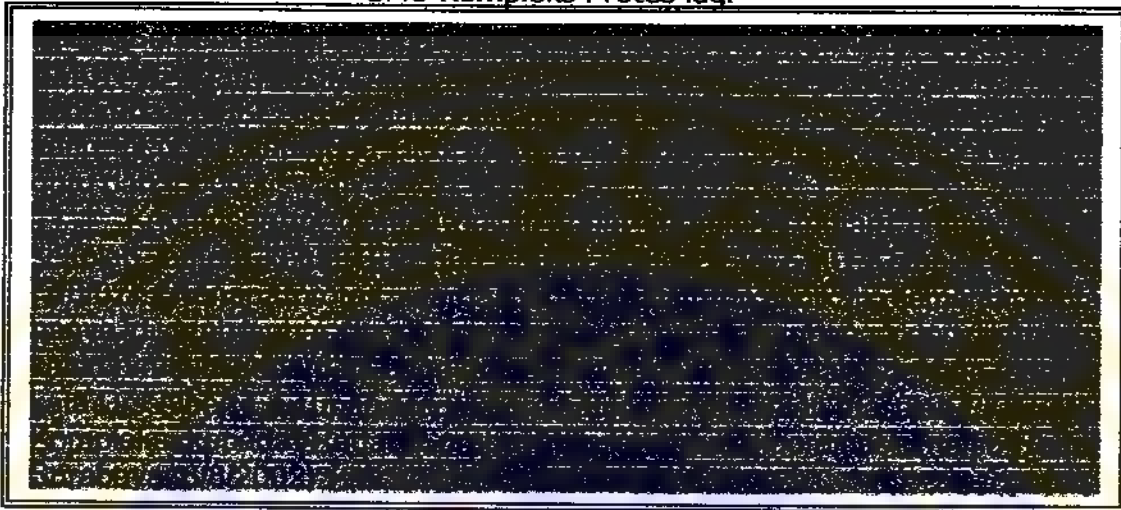
Di kalangan PKL kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang bernada menyalahkan pemerintah kota. PKL yang berjualan di Taman Surya adalah warga kota Surabaya sendiri, kenapa harus dilarang mencari matapencarian di wilayah sendiri. Padahal menurut Cak Narto ketika masih menjadi walikota, Taman Surya adalah milik rakyat dan dapat dipergunakan oleh warganya untuk berjualan. Tetapi ketika Cak Narto tidak lagi menjabat PKL diusir begitu saja dari Taman Surya. Setelah mengetahui Taman Surya tidak dapat ditempati untuk berjualan, sebagian PKL menggelar barang dagangannya di sekitarnya, termasuk di jalan Sedap Malam. Tetapi penempatan PKL di jalan Sedap Malam belum ada lampu hijau dari aparat pemerintah kota. Para PKL begitu saja mengkapling-kapling jalan Sedap Malam untuk menggelar dagangannya sebagai ganti di Taman Surya.

Di saat teman-temannya sesama PKL berjualan di jalan Sedap malam, Pak Ponimin selaku ketua KOPYA menerima surat undangan dari Dispol PP yang ditanda tangani Pak Kadri Kusuma. Surat itu ditujukan kepada Ketua Kelompok Pedagang Taman Surya (KOPYA). Surat dari Dinas Polisi Pamong Praja bernomor 005/100/402.2.21/2002 berisi tentang undangan yang

diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2002 jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Dispol PP Kota Surabaya jalan Jaksa Agung Suprpto No 6 Surabaya. Acara dalam surat itu adalah Rapat koordinasi masalah PKL Taman Surya atau Jln. Sedap Malam. Surat ini ditandatangani langsung oleh Pak Kadri Kusuma sebagai Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2002 jam 08.30 WIB. perwakilan dari PKL yang datang adalah Pak Ponimin, Pak Khoiron, Pak Teguh, Pak Marno dan Pak Dar sudah sampai di ruang rapat Dispol PP Kota Surabaya jalan Jaksa Agung Suprpto No 6 Surabaya. Setelah memberitahukan maksud kedatangannya bahwa diundang rapat Pak Kadri, kelima perwakilan PKL dipersilahkan memasuki ruang rapat yang berada di ruang nomor dua dari pintu masuk bagian depan (Barat). Beberapa saat kemudian Pak Kadri ditemani Pak Umar dari Dispol PP dan satu orang lain --informan lupa namanya-- datang di ruang rapat langsung duduk menghadap ke arah Timur. Tempat duduk Pak Kadri, Pak Umar dan satu orang staf Dispol PP berada di sebelah Selatan pintu masuk ruang rapat. Pak Kadri duduk diapit Pak Umar di sebelah Selatan dan satu staf lainnya berada di sebelah Utara. Di hadapan Pak Kadri terdapat meja panjang kira-kira berukuran lebar 1 meter dan panjang 3 meter. Sementara itu di sisi meja sebelah Timur -- tepat berhadapan dengan Pak Kadri-- duduk perwakilan PKL, yang berjajar

Boks 2
SMU Kompleks Protes lagi



dari Utara ke Selatan berturut-turut yaitu Pak Ponimin, Pak Teguh, Pak Khoiron dan dan pak Marno.

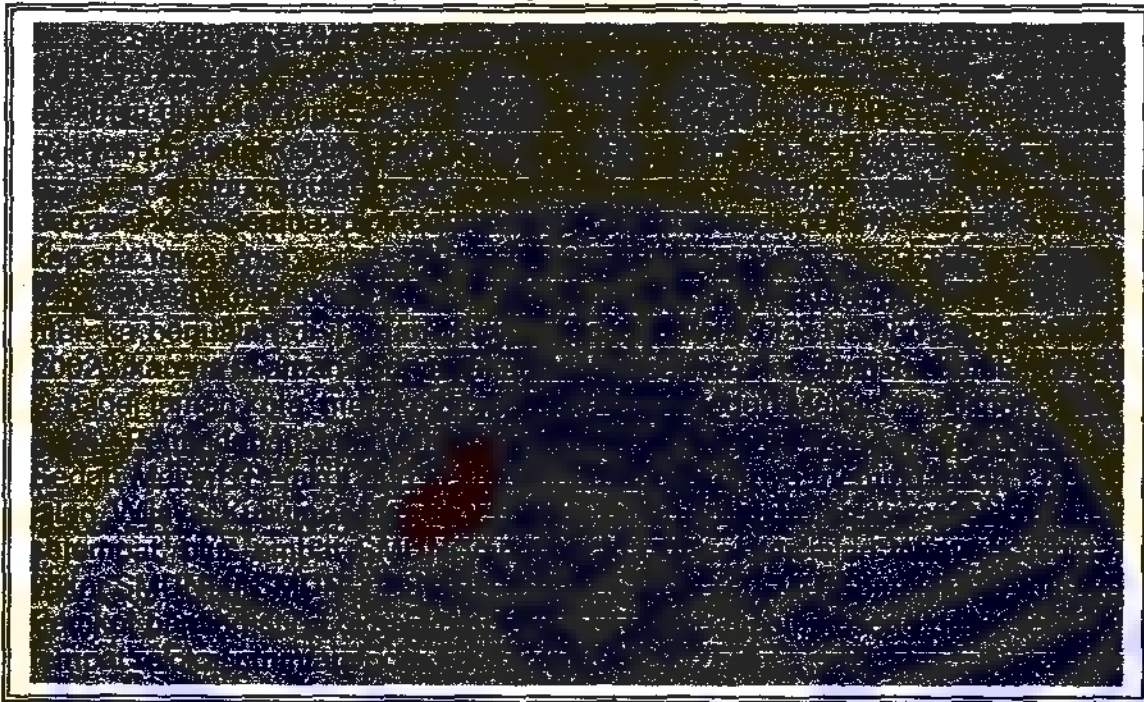
Dalam rapat itu Pak Ponimin dan keempat temannya melakukan pembicaraan tentang kelangsungan berjualan bagi PKL Taman Surya. Pak Ponimin dan keempat temannya tetap bersikeras meminta dapat berjualan kembali di Taman Surya. Kalau toh tidak bisa perwakilan PKL tetap berharap dapat berjualan disekitar Taman Surya. Permintaan ini sebagai alternatif bagi PKL kalau memang PKL benar-benar tidak diperbolehkan lagi berjualan di Taman Surya. Rapat dengan Pak Kadri berjalan agak alot, karena belum menemukan titik temu. Karena perwakilan PKL tetap bersikeras ingin berjualan di Taman Surya. Rapatnya baru berakhir 12.30 WIB. Setelah melalui berbagai adu argumentasi, akhirnya Pak Kadri mengambil jalan tengah dengan mengizinkan PKL berjualan di jalan Sedap Malam. Pilihan ini merupakan jalan tengah karena PKL masih dekat dengan

lokasi semula yaitu Taman Surya. Di pihak perwakilan PKL akhirnya menerima dengan tetap berjualan di jalan Sedap Malam.

Akhirnya secara resmi --kendati tidak ada surat secara resmi yang mengatakan bahwa PKL diperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam-- yang diwakili Pak Kadri pihak Satpol PP selaku wakil dari pemerintah kota Surabaya memperbolehkan PKL ex Taman Surya berjualan tidak jauh dari lokasi semula, yaitu di jalan Sedap Malam. Waktu itu semua pedagang ex Taman Surya diperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam. Karena jumlah PKL ex Taman Surya begitu banyak, akhirnya jalan Sedap Malam tidak dapat menampungnya. PKL akhirnya tidak saja berjualan dan memenuhi jalan Sedap Malam tetapi juga meluber hingga depan masjid Muhajirin, Jimerto sampai belok ke Barat hampir ke jalan Jaksa Agung Suprpto. Selain di jalan Sedap Malam dipindah ke Wijaya Kusuma dan Jimerto. PKL yang di jalan Sedap Malam berasal dari PKL Taman Surya sebelah Timur, sedangkan PKL Taman Surya sebelah Barat di pindah ke jalan Jimerto dan Wijaya Kusuma.

Di jalan Sedap Malam terdapat PKL yang menggelar dagangannya sebanyak 4 baris dari ujung bagian Selatan jalan Sedap Malam hingga ke Utara sampai jalan Jimerto. Baris paling Barat posisi PKL menghadap ke arah Timur. Sementara itu di bagian tengah jalan Sedap Malam terdapat 2 baris yang saling bertolak belakang, satu baris menghadap ke arah Barat dan satu baris menghadap ke arah Timur. Sedangkan baris PKL di bagian Timur jalan

Boks 3
Akhirnya, Wijaya Kusuma Bebas PKL
Mulai hari ini (8/8/2002) Mereka Dipindah ke THR



Sedap Malam posisinya menghadap ke arah Barat. Keempat baris PKL yang berada di jalan Sedap Malam ini semua berjualan non makanan. Sementara PKL yang berjualan makanan berada di trotoar jalan Sedap Malam yang berada di sisi Timur dan Barat. Trotoar sisi Barat berada tepat menempel dengan Taman Surya.

Di bagian Timur jalan Sedap Malam, PKL tidak hanya menggelar dagangannya di jalan yang beraspal. Tetapi PKL juga menempati trotoar yang berada tepat di samping tembok pagar halaman rumah-rumah warga yang bertempat tinggal di sepanjang jalan itu. Penjual makanan di sebelah Timur jalan Sedap Malam menempati di trotoar yang berada di depan rumah-rumah warga yang tinggal di sepanjang jalan tersebut. Di waktu

malam hari --ketika PKL menggelar barang dagangannya-- tak jarang menutupi jalan masuk bagi warga yang tinggal di sepanjang jalan Sedap Malam. Akhirnya bagi warga yang tinggal di jalan Sedap Malam akan pulang atau meninggalkan rumah seringkali terhalang oleh PKL yang berjualan di depan rumahnya.

Selang satu bulan PKL menempati jalan Sedap Malam dan sekitarnya, ternyata digusur lagi. Bagi warga yang berada di jalan Sedap Malam, kehadiran PKL ternyata dianggap telah mengganggu ketenangan maupun kebersihannya. Menurut informasi tidak sedikit penghuni rumah atau warga di jalan Sedap Malam tidak dapat masuk gara-gara pintu pagar rumahnya ditempai PKL menggelar dagangannya. Dengan adanya keberatan dari warga jalan Sedap Malam dan sekitarnya akhirnya PKL di gusur lagi semakin menjauh dari Taman Surya, yaitu di jalan Wijaya Kusuma. Terusirnya PKL ex Taman Surya yang kedua kalinya semakin memperkuat bahwa para PKL memang diusir secara halus.

Kalangan PKL mengira diusirnya dari Jalan Sedap Malam ke tempat yang semakin menjauh merupakan cara pemerintah kota menggusur secara pelan-pelan. Apalagi ada penolakan dari warga yang tinggal di jalan Sedap Malam sehingga bagi pemerintah kota tidak ada pilihan lain kecuali memindahkan PKL ke tempat lain. Pemerintah kota beralasan warga yang tinggal di sepanjang jalan Sedap Malam harus juga dihormati kepentingannya. Hanya saja waktu itu belum sempat ditemukan antara

Gambar 2
Taman Surya Dijaga Satpol PP Kota Surabaya
Radar Surabaya, 25/6/2002



warga yang menolak kehadiran para pedagang di jalan Sedap Malam dengan PKL. Di kalangan PKL semakin timbul tanda tanya kenapa penggusuran dari jalan Sedap Malam dilakukan begitu saja tanpa ada perundingan.

Dengan alasan penolakan dari warga yang tinggal di sepanjang jalan Sedap Malam, akhirnya pemerintah kota Surabaya mensterilkan jalan tersebut dari PKL. Mulai pagi hari ketika ada perintah bahwa jalan Sedap Malam tidak diperbolehkan lagi sebagai tempat berjualan bagi PKL, aparat Dispol PP sudah berjaga-jaga di sepanjang jalan Sedap Malam. Di ujung jalan Sedap Malam bagian Selatan terlihat sebanyak 10 anggota Dispol PP yang siap menghadang PKL yang akan berjualan di jalan Sedap Malam. Sementara itu di ujung jalan Sedap Malam bagian Utara terlihat lebih banyak aparat Dispol PP yang berjaga. Di bagian Utara ini kira-kira ada sebanyak 20 orang aparat Dispol PP yang berjaga-jaga agar PKL tidak memasuki jalan Sedap Malam. Melihat penjagaan ketat di ujung jalan Sedap Malam, kalangan PKL tidak bisa berbuat apa-apa. Para PKL akhirnya menerima kebijakan pemerintah kota tidak lagi memperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam, tetapi hanya boleh berjualan di jalan Wijaya Kusuma (depan SMA kompleks).

Digusurnya PKL untuk yang kedua kalinya semakin memperkuat keyakinan di kalangan PKL bahwa pemerintah kota sengaja mengusirnya dari Taman Surya. Anggapan PKL semacam itu sangat terasa ketika

melakukan demonstrasi ke DPRD Kota Surabaya. Ketika melakukan demonstrasi di DPRD kota Surabaya tampak hadir dari kalangan eksekutif. Kalangan eksekutif inilah membawa bukti-bukti berupa foto-foto yang menggambarkan bagaimana rusaknya Taman Surya. Tak sedikit tanaman yang mati, rumput yang mengguning, batang bunga patah dan berserakan tidak karuan. Dalam foto-foto yang ditunjukkan oleh perwakilan dari pemerintah kota Surabaya terpampang bagaimana rusaknya Taman Surya. Gambar kondisi Taman Surya dalam foto itu sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, Taman Surya yang merupakan halaman Balai Kota tempat orang nomor 1 berkantor di kota kedua terbesar setelah Jakarta kondisinya *rungsep*.

Parahnya yang dituduh merusak Taman Surya justru PKL. Rusaknya Taman Surya menurut pembawa foto akibat PKL menggelar barang dagangannya. Tetapi pada waktu itu perwakilan PKL yang ada di gedung DPRD kota Surabaya berargumentasi bahwa rusaknya Taman Surya bukan karena ulah PKL, tetapi karena pameran dan kedua acara Laris Manis.. Karena itu di mata para PKL, sejak awal --ketika selesai acara Laris Manis SCTV di Taman Surya-- pemerintah kota mencari-cari alasan bagaimana caranya mengusir PKL. Pak Ponimin menjelaskan bahwa pemerintah kota Surabaya memang sengaja mengusir PKL dari Taman Surya.

"...begini, alasan Pemkot mengusir kita (PKL) adalah karena merusak taman. Pada saat pameran, ya jelas rusak, wong dipakai stand dan jalan bagi pengunjung, apalagi selama pameran (selama satu bulan) Taman Surya ditutup sebagai atapnya, karenanya kan

lembab. Karena tertutupinya dan diinjak-injak pengunjung inilah sebenarnya rusaknya tanaman yang ada di Taman Surya. Dari sini PKL dijadikan kambing hitam, kasarnya kita dari PKL di fitnah....”.

Menurut argumen perwakilan PKL, biang kerok rusaknya bukan semata-mata karena PKL, tetapi karena terinjak-terinjak penonton saat acara Laris Manis berlangsung. Seperti acara-acara pagelaran dangdut lainnya, umumnya penonton yang menyaksikan berjubel-jubel. Tidak ketinggalan irama dangdut dapat “menghipnotis” penonton sehingga ikut berjoget mengikuti irama yang sedang dimainkan. Justru penonton acara Laris Manis inilah yang dianggap para PKL yang merusak tanam-tanaman di Taman Surya, bukan karena pedagang menggelar dagangannya. Para PKL semakin yakin bahwa pemerintah kota sengaja menggelar acara besar-besar di Taman Surya sehingga kondisinya menjadi rusak. Kalau sudah rusak maka ada alasan pemerintah kota memperbaikinya dan memfungsikan kembali sebagai taman bukan pasar. Pak Ponimin menjelaskan bahwa:

”....pada saat kita demo di DPRD, PKL ditunjukkan foto-foto kondisi Taman Surya yang rusak. Tanaman bunga pating slengkrah, layu, rumput-rumput menguning, bahkan ada yang sudah mati sehingga kelihatan tanahnya. Tapi PKL termasuk saya mengetahui kalau rusaknya tanaman baik bunga maupun rumput bukan karena PKL tapi setelah acara Pameran dan Laris Manis....”.

Pada saat itu di DPRD perwakilan PKL sudah membatahnya. Bahkan Pak Ponimin sempat berdebat dengan Herman Rifai, Pak Gatot dan Pak Kadri Kusuma, bahwa yang merusak tanaman bukan semata-mata karena PKL, tetapi karena acara pemeran dan Laris Manis. Tetapi karena pihak

pemkot membawa bukti-bukti berupa foto-foto rusaknya Taman Surya, sementara PKL membantahnya tidak didasari bukti atau tidak bisa menunjukkan bukti-bukti konkrit, akhirnya perwakilan PKL tidak dapat secara telak membantah bukti-bukti yang dibawa pemerintah kota.

Ketika PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di jalan Sedap Malam, PKL menerima kebijakan pemerintah yang mengharuskan berjualan di sepanjang jalan Wijaya Kusuma. PKL berjajar di sepanjang jalan sisi Timur dan Barat mulai dari Utara hingga ke Selatan. Tetapi PKL yang dipindah ke jalan Wijaya Kusuma ini lebih banyak berkumpul di sekitar sekolah-sekolah yang ada. Di sisi sebelah Timur PKL tak pelak menggelar dagangannya di depan sekolah-sekolah yang ada di jalan Wijaya Kusuma yang dikenal dengan SMA Kompleks.

Di jalan Wijaya Kusuma atau sekitar SMA Kompleks ternyata penderitaan PKL belum berakhir. Alih-alih mendapatkan pembeli yang menjadi pelanggan, memperoleh pembeli yang kemudian dapat digunakan memutar modal saja sudah untung, ternyata keburu digusur lagi. PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di sekitar SMA Kompleks. PKL harus pindah dari lokasi yang berada di sekitar SMA kompleks ke tempat yang ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya. Pada saat hari H, PKL harus hengkang dari jalan Wijaya Kusuma, pihak pemerintah kota mengeluarkan kekuatan penuh. Tidak saja dari kalangan Dispol PP yang sebelumnya menjadi ujung tombak

penertiban PKL, tetapi juga aparat kecamatan dan kelurahan turun tangan agar PKL pindah ke tempat yang sudah disediakan.

Pihak pemerintah kota beralasan bahwa pemindahan PKL dari lokasi sekitar SMA Kompleks bukan semata-mata kehendaknya. Tetapi pemindahan PKL dari SMA Kompleks karena penolakan dari pihak sekolah. Menurut pemerintah kota, pihak sekolah --SMUN 1, SMUN2, SMUN 5 dan SMUN 9 telah mengirim surat keberatan atas pemindahan PKL dari jalan Sedap Malam ke jalan-jalan di sekitar SMA Kompleks. Pihak sekolah mengkhawatirkan kehadiran para PKL di sekitar sekolah akan membawa dampak yang merugikan kepada proses belajar mengajar. Setidak-tidaknya kehadiran PKL akan mengganggu murid-murid yang sedang belajar. Bahkan saat itu pihak sekolah mengkhawatirkan kehadiran PKL tidak menutup kemungkinan dijadikan ajang transaksi Narkoba. Dengan alasan-alasan seperti ini maka pihak sekolah keberatan dan menolak kehadiran PKL di sekitar SMA Kompleks.

Pihak pemerintah kota memiliki alasan tersendiri kenapa PKL dipindah-pindah dari Taman Surya hingga akhirnya ke Taman Hiburan Rakyat (THR). Pihak pemerintah beralasan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) harus ditegakkan. Misalnya fungsi-fungsi fasilitas publik harus dikembalikan ke fungsi aslinya, termasuk taman bukan untuk berjualan tetapi sebagai fasilitas umum sebagai taman kota. Kalangan pemerintah kota beralasan bahwa Taman Surya adalah fasilitas umum jadi di komplain sama yang

punya fasilitas umum yaitu walikota dan juga warga. Sementara itu pemerintah kota juga menampung permintaan warga kota yang dituntut untuk dikembalikan ke fungsi semula sebagai taman. Atas desakan warga maka akhirnya pemerintah kota berusaha memfungsikan kembali sebagai taman misalnya dapat digunakan untuk olah raga. Bukan untuk jualan sehingga mereka dipindahkan ke jalan Kusuma Bangsa dan tamannya tidak boleh diganggu pedagang. Sementara itu di jalan Sedap Malam pada kenyataan juga sama, yaitu warga tidak menerima di depan rumahnya ditempati PKL. Karena itu akhirnya dipindah ke SMA Kompleks.

Setelah dipindah dari SMA Kompleks ke THR tidak semua PKL dapat menerima dan kemudian mau pindah ke tempat yang ditentukan pemerintah kota. Pemerintah akhirnya memutuskan PKL ex Taman Surya dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR). Tetapi tidak semua PKL dapat menerima keputusan pemerintah kota Surabaya memindahkan ke THR. Sebagian PKL menerima pindah ke THR, sementara sebagian lainnya tetap pada pendirian tidak dapat menerima. PKL yang tidak menerima pindah ke THR akhirnya berjualan di tempat-tempat lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dorongan PKL bereaksi melakukan perlawanan pada dasarnya disebabkan oleh pemerintah kota Surabaya melarang aktivitas berjualan di Taman Surya. Larangan bagi PKL berjualan di Taman Surya merupakan penyebab yang kuat melakukan perlawanan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

Seperti diketahui para PKL mengandalkan pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya dari berjualan di Taman Surya. Memang bagi PKL dapat saja mencari di tempat lain untuk berjualan, tetapi berjualan di Taman Surya telah dirasakan sangat menguntungkan. Tidak sedikit PKL yang berjualan di Taman Surya mengakibatkan kebutuhan ekonomi keluarga lebih dari cukup. Tetapi kemudian tiba-tiba harus angkat kaki dari tempat yang sebelumnya memberi penghasilan yang dapat diandalkan.

Selain itu perlakuan tidak adil terhadap PKL --yang dituduh merusak tanaman di Taman Surya— merupakan penyebab lain melakukan perlawanan. Dijadikan "kambing hitam" oleh pemerintah kota, bahwa PKL yang menjadi penyebab rusaknya tanaman di Taman Surya merupakan pendorong lainnya melakukan perlawanan. Pengalaman yang sama di kalangan PKL merupakan energi yang menyatukan perlawanan terhadap pemerintah kota.*

penertiban PKL, tetapi juga aparat kecamatan dan kelurahan turun tangan agar PKL pindah ke tempat yang sudah disediakan.

Pihak pemerintah kota beralasan bahwa pemindahan PKL dari lokasi sekitar SMA Kompleks bukan semata-mata kehendaknya. Tetapi pemindahan PKL dari SMA Kompleks karena penolakan dari pihak sekolah. Menurut pemerintah kota, pihak sekolah --SMUN 1, SMUN2, SMUN 5 dan SMUN 9 telah mengirim surat keberatan atas pemindahan PKL dari jalan Sedap Malam ke jalan-jalan di sekitar SMA Kompleks. Pihak sekolah mengkhawatirkan kehadiran para PKL di sekitar sekolah akan membawa dampak yang merugikan kepada proses belajar mengajar. Setidak-tidaknya kehadiran PKL akan mengganggu murid-murid yang sedang belajar. Bahkan saat itu pihak sekolah mengkhawatirkan kehadiran PKL tidak menutup kemungkinan dijadikan ajang transaksi Narkoba. Dengan alasan-alasan seperti ini maka pihak sekolah keberatan dan menolak kehadiran PKL di sekitar SMA Kompleks.

Pihak pemerintah kota memiliki alasan tersendiri kenapa PKL dipindah-pindah dari Taman Surya hingga akhirnya ke Taman Hiburan Rakyat (THR). Pihak pemerintah beralasan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) harus ditegakkan. Misalnya fungsi-fungsi fasilitas publik harus dikembalikan ke fungsi aslinya, termasuk taman bukan untuk berjualan tetapi sebagai fasilitas umum sebagai taman kota. Kalangan pemerintah kota beralasan bahwa Taman Surya adalah fasilitas umum jadi di komplain sama yang

punya fasilitas umum yaitu walikota dan juga warga. Sementara itu pemerintah kota juga menampung permintaan warga kota yang dituntut untuk dikembalikan ke fungsi semula sebagai taman. Atas desakan warga maka akhirnya pemerintah kota berusaha memfungsikan kembali sebagai taman misalnya dapat digunakan untuk olah raga. Bukan untuk jualan sehingga mereka dipindahkan ke jalan Kusuma Bangsa dan tamannya tidak boleh diganggu pedagang. Sementara itu di jalan Sedap Malam pada kenyataan juga sama, yaitu warga tidak menerima di depan rumahnya ditempati PKL. Karena itu akhirnya dipindah ke SMA Kompleks.

Setelah dipindah dari SMA Kompleks ke THR tidak semua PKL dapat menerima dan kemudian mau pindah ke tempat yang ditentukan pemerintah kota. Pemerintah akhirnya memutuskan PKL ex Taman Surya dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR). Tetapi tidak semua PKL dapat menerima keputusan pemerintah kota Surabaya memindahkan ke THR. Sebagian PKL menerima pindah ke THR, sementara sebagian lainnya tetap pada pendirian tidak dapat menerima. PKL yang tidak menerima pindah ke THR akhirnya berjualan di tempat-tempat lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dorongan PKL bereaksi melakukan perlawanan pada dasarnya disebabkan oleh pemerintah kota Surabaya melarang aktivitas berjualan di Taman Surya. Larangan bagi PKL berjualan di Taman Surya merupakan penyebab yang kuat melakukan perlawanan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

Seperti diketahui para PKL mengandalkan pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya dari berjualan di Taman Surya. Memang bagi PKL dapat saja mencari di tempat lain untuk berjualan, tetapi berjualan di Taman Surya telah dirasakan sangat menguntungkan. Tidak sedikit PKL yang berjualan di Taman Surya mengakibatkan kebutuhan ekonomi keluarga lebih dari cukup. Tetapi kemudian tiba-tiba harus angkat kaki dari tempat yang sebelumnya memberi penghasilan yang dapat diandalkan.

Selain itu perlakuan tidak adil terhadap PKL —yang dituduh merusak tanaman di Taman Surya— merupakan penyebab lain melakukan perlawanan. Dijadikan “kambing hitam” oleh pemerintah kota, bahwa PKL yang menjadi penyebab rusaknya tanaman di Taman Surya merupakan pendorong lainnya melakukan perlawanan. Pengalaman yang sama di kalangan PKL merupakan energi yang menyatukan perlawanan terhadap pemerintah kota.*

Mempersiapkan Perlawanan: Membangun Jaringan Sosial

Membangun jaringan sosial yang digunakan sebagai modal melakukan perlawanan bagi PKL di pengaruhi juga oleh personal pemimpin kota Surabaya baik secara pribadi maupun kelembagaan. Secara personal ketika Cak Narto menjabat walikota Surabaya, terkenal dengan julukannya *bapake wong cilik*. *Wong cilik* yang dimaksud oleh kalangan PKL adalah warga kota tanpa kecuali kalangan bawah. Tetapi banyak yang memberi tafsiran atau mengkonotasikan

yang dimaksud *wong cilik* adalah kalangan bawah termasuk di dalamnya para PKL.

Sepeninggal Cak Narto, PKL tidak lagi menikmati "masa emasnya" di kota Surabaya. Semasa Cak Narto memimpin kota Surabaya PKL seakan dimanjakan. Razia atau penggusuran yang mengorbankan PKL tidak terjadi. Akibatnya pertumbuhan PKL di Surabaya meningkat tajam. Memang menjamurnya PKL bukan semata-mata karena Cak Narto, tetapi disebabkan juga oleh situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Salah satu dampak krisis adalah semakin meningkatnya angka pengangguran. Sementara sektor yang dengan mudah dapat menampung luapan pengangguran adalah sektor informal khususnya PKL.

Mengadu ke Cak Narto

Sebutan walikota Surabaya sebagai *bapake wong cilik* akhirnya berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah PKL di kota yang juga dikenal dengan sebutan kota pahlawan. Semenjak Cak Narto menjabat walikota, PKL menjamur di kota Surabaya terutama di jalan-jalan protokol. Di jalan Tunjungan misalnya --sekitar kompleks pertokoan Siola-- PKL meningkat tajam sehingga banyak dikeluhkan oleh pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Di tempat-tempat lainnya menunjukkan gejala yang sama yaitu peningkatan jumlah PKL. Termasuk PKL di Taman Surya, meningkat tajam semenjak walikota dipimpin Cak Narto.

Sebutan *bapake wong cilik* akhirnya membawa konsekwensi logis lunaknya penanganan terhadap PKL yang ada di kota Surabaya. Pada saat walikota Cak Narto, para PKL merasakan kebebasannya menjajakan dagangannya tanpa banyak khawatir kena razia atau tergusur. Kalangan PKL merasakan jamannya walikota Cak Narto merupakan "surganya" dalam mengais rejeki dalam sektor informal. Praktis ketika Cak Narto menjabat walikota pengusuran terhadap PKL nyaris tidak terdengar. Dalam konteks ini Cak Narto agaknya mengabaikan Perda tentang PKL yang telah ada sebelumnya. Pemerintah kota Surabaya pernah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor: 10 Tahun 1987 tanggal 20 Mei 1987 tentang: Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Surabaya. Dalam Perda ini yang disebut sebagai Pedagang kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya

Pada awal-awal Cak Narto memimpin Kota Surabaya sempat melarang PKL berjualan di Taman Surya. Tetapi saat walikota Cak Narto melarang PKL berjualan di Taman Surya berbeda dengan ketika walikota dijabat Bambang DH. Pada saat Cak Narto mengeluarkan larangan, PKL masih dapat berjualan. Dinas Satpol PP yang bertugas menegakkan Perda masih belum bertindak secara tegas, misalnya menggusur PKL dari Taman Surya. PKL Taman Surya belum terusir dari tempat yang sebelumnya telah memberikan lahan mencari rejeki. Ketika mengeluarkan larangan berjualan di Taman Surya Cak Narto belum

membackup dengan kebijakan yang mengharuskan Satpol PP menindak tegas terhadap PKL di Taman Surya.

Larangan bagi PKL berjualan di Taman Surya mendapat respon dari pedagang yang sebelumnya telah memperoleh rejeki dari berjualan di halaman Kotamadya. Pada saat Cak Narto melarang berjualan di Taman Surya, para PKL meresponnya dengan tindakan yang jauh dari lebih lunak. Pada saat itu tidak melakukan perlawanan dengan membentangkan spanduk dan kemudian disertai dengan melakukan orasi. Respon yang diambil para PKL tetap dengan melakukan perlawanan, tetapi dengan cara yang halus. Tujuan perlawanan waktu itu agar supaya PKL tetap diijinkan berjualan di Taman Surya. Tetapi langkah yang diambil dengan cara lebih menggugah jiwa Cak Narto sebagai walikota yang mendapat sebutan *bapake wong cilik*.

Berdasarkan dari sebutan Cak Narto sebagai *bapake wong cilik*, maka pada waktu itu para "pentolan" PKL Taman Surya akhirnya menemukan ide melakukan perlawanan bukan dengan cara perlawanan dan kemudian mencaci maki walikota. Tetapi perlawanan yang dilakukan harus dengan cara yang "santun" dengan cara mengetuk hati Cak Narto agar menaruh belas kasihan kepada PKL yang akan tergusur. Akhirnya muncul ide bahwa perlawanan tidak dilakukan dengan cara orasi yang meledak-ledak, tetapi dilakukan dengan cara mengedepankan tindakan yang membuat Cak Narto merasa kasihan kepada nasib PKL Taman Surya seandainya benar-benar tetap tidak diperbolehkan lagi

berjualan. Pak Ponimin sebagai PKL yang telah lama di Taman Surya akhirnya didaulat sesama pedagang untuk mengurus nasibnya

Pak Ponimin yang menerima mandat berusaha mencari cara yang paling tepat untuk menjaga kelangsungan berjualan di Taman Surya. Akhirnya Pak Ponimin mempunyai ide, bahwa lebih baik dari kalangan wanita atau ibu-ibu yang sudah tua yang berada di depan mendatangi Cak Narto. Setelah itu baru di belakangnya PKL yang muda-muda dan mempunyai pemikiran bagaimana memikirkan kelangsungan nasib pedagang yang berjualan di Taman Surya. Pak Ponimin berkeyakinan bahwa Cak Narto, bertipe orang yang dekat dengan orang kecil. Berangkat dari keyakinan seperti itu maka Pak Ponimin yang sedang berunding dengan sesama PKL di jalan Sedap Malam kemudian direalisasikan dengan mendatangi ke rumah dinas Cak Narto di jalan Sedap Malam. Sejak berunding sesama PKL sudah ditekankan bahwa menghadap Cak Narto bukan dengan kekerasan, tetapi titik tekannya adalah menggugah belas kasihan. Karena itu teknis ketika menghadap ke Cak Narto harus juga menunjukkan tindakan yang berakibat munculnya rasa belas kasihan walikota.

Ide sudah ditemukan, bahwa PKL tetap mengadu ke Cak Narto menyikapi pelarangan bagi pedagang berjualan di Taman Surya. Tetapi harus dicarikan cara bagaimana mengadu yang dapat menggugah rasa belas kasihan khususnya Cak Narto. Diharapkan rasa belas kasihan Cak Narto akhirnya dapat mencabut larangan berjualan di Taman Surya. Ide dasar bahwa perlawanan ke Cak Narto

harus dapat menggugah belas kasihan kemudian dipikirkan dan dibicarakan di kalangan PKL.

Beberapa PKL Taman Surya yang ditokohkan kemudian saling bertukar pikiran untuk menemukan cara perlawanan dengan menonjolkan tindakan yang membuat orang yang muncul rasa belas kasihannya. Para PKL yang ditokohkan atau dianggap dapat membawa dan mewakili aspirasi PKL terus memutar otak dan berdiskusi dengan sesama pedagang. Dari berbagai pendapat akhirnya disepakati ide yang berasal dari pak Ponimin bahwa yang menjadi perwakilan dan berbicara dengan Cak Narto bukan orang-orang yang pandai bicara saja seperti PKL yang ditokohkan atau menjadi koordinator pedagang. Tetapi lebih baik berasal dari PKL yang perempuan dan sudah agak setengah umur atau tua. Selain pedagang perempuan yang sudah tua-tua berada di depan menjadi wakil yang akan berbicara langsung dengan Cak Narto, diikutsertakan juga anak-anaknya terutama yang masih kecil-kecil dan bersekolah.

Ketika akan mengadu ke walikota Sunarto ditemukan beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar menentukan siapa pedagang perempuan yang akan berada di depan menjadi perwakilan PKL. Beberapa pertimbangan itu adalah, perempuan yang sudah agak tua, masih memiliki anak kecil terutama yang masih sekolah, menjadi tulang punggung penyangga ekonomi keluarga dan berdagang dengan omzet dan barang dagangan yang relatif kecil. Akhirnya ditemukan pedagang-pedagang yang dianggap pas untuk menjadi perwakilan PKL menemui Cak Narto. Pedagang perempuan yang ikut menemui dan menjadi

perwakilan PKL mendatangi Cak Narto adalah berjualan *krupuk upil, kacang godhog, pisang goreng, jagung bakar dan glali (seperti permen, terbuat dari gula yang dapat di tarik-tarik/diolor-olor)*.

Mengadu yang dilakukan PKL Taman Surya kepada Cak Narto diberi nama perlawanan "ekonomi belas kasihan". Nama ini diambil karena perlawanan yang dilakukan menggunakan cara lebih pada menggugah belas kasihan daripada daripada saling beradu argumentasi. Perlawanan yang dilakukan tidak dengan orasi menggunakan pengeras suara atau membentangkan spanduk tetapi lebih banyak "*sambat*" (mengeluarkan isi hati setulus mungkin) dan mengibakan. Waktu mendatangi Cak narto di rumah dinas perwakilan PKL tetap seperti rencana yang sengaja datang adalah orang-orang perempuan yang tua bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ada sebanyak 5 (lima) orang ibu-ibu yang membawa anak-anaknya dan 5 (lima) orang laki-laki. Karena yang dilakukan lebih banyak memperlihatkan bagaimana nasib keluarganya ke depan setelah dilarang berjualan di Taman Surya. PKL tidak protes dengan cara perlawanan atau menonjolkan fisik. (Deskripsi suasana menjelang ke rumah dinas Cak Narto dapat dilihat di bab 4, Dinamika Taman Surya)

Kalangan PKL yang menjadi perwakilan adalah Pak Ponimin, Pak Jono, Pak Dar dan Pak Wanto. Sementara dari PKL perempuan di wakili oleh bu Suminah (60 tahu), bu Mariyam (50 tahun), bu Misratun (55 tahun), bu Sрати (54 tahun) dan bu Rokayah (47 tahun). Setelah berunding sebentar di sebelah sebelah Selatan pintu pagar Taman Surya (pintu pagar ada di sebelah Timur Balai Kota),

rombongan lalu menuju rumah Dinas Walikota yang berada di pojok jalan Sedap Malam sisi Timur. Di pintu masuk pagar halaman rumah Dinas walikota rombongan PKL sempat terhenti, karena petugas penjaga pintu tidak memperbolehkan masuk. Dari kalangan PKL meminta ke penjaga supaya disampaikan ke Cak Narto bahwa akan bertemu walikota. Perwakilan agak sedikit memaksa supaya diijinkan menemui Cak Narto. Akhirnya penjaga berusaha berkomunikasi dengan Cak Narto yang ada di dalam rumah. Sesaat kemudian penjaga rumah dinas walikota menemui perwakilan PKL yang menunggu di pintu pagar bagian luar. Petugas membuka pintu pagar dan mempersilahkan perwakilan PKL menuju ruang tamu rumah Dinas Walikota. Setelah menutup pintu pagar, satu penjaga mengantarkan perwakilan PKL menuju ruang tamu yang menghadap ke sebelah Barat, sementara satu penjaga lainnya tetap berada di pos pintu masuk kediaman walikota Surabaya.

Penjaga yang mengantarkan perwakilan PKL mempersilahkan menunggu di ruang tamu. Para perwakilan PKL yang terdiri dari 10 orang ditambah 4 anak-anak menunggu di ruang tamu dengan duduk lesehan di atas karpet. Beberapa saat kemudian Cak Narto keluar dari dalam menuju ruang tamu di mana perwakilan PKL sedang menunggu. Cak mengenakan celana panjang warna biru gelap dan baju hem batik lengan panjang berwarna coklat muda. Cak Narto duduk di kursi menghadap ke arah Utara –di ruang tamu rumah dinas di jalan Sedap Malam. Sementara itu para PKL duduk lesehan di atas karpet berwarna coklat menghadap Cak Narto atau ke arah Selatan. Di posisi paling

depan, berhadapan langsung dengan Cak Narto adalah lima ibu-ibu atau wanita rata-rata berusia 50 tahun. Di belakang ibu-ibu –di sebelah Utara ibu-ibu– duduk berderet lima laki-laki berturut dari Barat ke Timur adalah Pak Ponimin, Pak Dar, Pak Jono, Pak Suroso dan Pak Wanto. Sementara sebagian anak-anak ada yang dipangku ibu-ibu yang berhadapan langsung dengan Cak Narto.

Sebagai *bapake wong cilik* –para PKL menyebut–, maka sikapnya dapat diduga bahwa Cak Narto akan menerima kedatangan PKL Taman Surya yang akan mengeluarkan *uneg-unegnya* berkaitan dengan pelarangan berjualan di depan kantor walikota. Ternyata pada saat rombongan PKL dari Taman Surya mendatangi rumah dinas di jalan Sedap Malam, Cak Narto menerimanya dengan senang hati. Para PKL diterima dan dipersilahkan masuk ke rumah dinas. Karena merasa sebagai *wong cilik* para PKL tidak bertindak arogan dihadapan Cak Narto. Ini tentu berbeda setelah reformasi, ketika pasca reformasi, semua milik negara dianggap sebagian masyarakat sebagai milik rakyat. Tak jarang sebagian masyarakat kemudian memperlakukan aset-aset milik pemerintah sebagai miliknya. Ketika duduk di kursipun di tempat-empat fasilitas pemerintah termasuk rumah dinas pejabat akan seenaknya berperilaku.

Pada saat mengadu ke Cak Narto yang kemudian kalangan PKL Taman Surya menyebut dengan istilah “perlawanan ekonomi belas kasihan” sikap-sikap seperti itu tidak nampak sama sekali. Sejak awal bahwa perlawanan –lebih tepat mengadu– yang dilakukan ke Cak Narto lebih banyak ditujukan untuk

menggugah belas kasihannya, bukan karena pemaksaan kehendak. Kelompok perwakilan PKL Taman Surya yang datang ke rumah dinas Cak Narto merasa benar-benar sebagai *wong cilik* dan diikuti dengan tindakan perilakunya.

Dalam posisi duduk lesehan di hadapan Cak Narto ibu-ibu yang tergolong tua beserta anak-anak tadi mengeluarkan *uneg-unegnya*, termasuk keluhan-kesahnya ketika dilarang berjualan di Taman Surya. Di hadapan Cak Narto ibu-ibu yang menjadi perwakilan PKL menuturkan bagaimana harus membiayai ekonomi keluarga dan membayar pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah ketika nantinya benar-benar tidak diperbolehkan lagi berjualan di Taman Surya. PKL perempuan yang menjadi perwakilan menuturkan bagaimana nantinya membiayai anak-anak yang masih sekolah ketika sumber penghasilan yang selama ini menopang seluruh biaya sekolah dan ekonomi keluarga harus dipangkas. Para perempuan ini menuturkan keluhan-kesahnya dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh perasaannya.

Di hadapan PKL khususnya ibu-ibu yang menjadi perwakilan, bahwa di larangnya berjualan di Taman Surya bagaikan tersambar petir di siang bolong. Terbentang di depan mata ibu-ibu, bahwa anak-anaknya akan tidak bisa sekolah lagi dan kebutuhan ekonomi akan sulit dipenuhi. Bayangan seretnya penghasilan dan tangisan anak-anak meminta dibelikan makanan dan mainan terus membayangi ketika tidak lagi berjualan di Taman Surya. Memang betul dapat pindah ke tempat lain, tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak-anaknya

masih penuh tanda tanya. Di benak PKL, setelah pindah dari Taman Surya harus pindah ke mana? Apakah di tempat lain ada jaminan tidak digusur atau ada jaminan mendapatkan penghasilan setidaknya sama dengan di Taman Surya masih gelap penuh ketidakpastian. Bayangan yang "menyeramkan" ketika PKL benar-benar diusir dari Taman Surya menjadikan ibu-ibu bercerita penuh dengan perasaan yang menggugah kasihan. Sampai-sampai ibu-ibu bercerita dengan meneteskan air mata. Bahkan waktu itu ada ibu-ibu yang menangis sampai tersedu-sedu.

Setelah Cak Narto mendengar cerita ibu-ibu yang datang dan bersimpuh dihadapannya akhirnya walikota yang dikenal juga masih keturunannya Sawunggaling itu *trenyuh* dan dapat memahami apa yang disampaikan PKL Taman Surya yang diwakili oleh kaum ibu. Cak Narto dapat menerima keluhan yang disampaikan ibu-ibu dengan uraian airmata. Cak Narto akhirnya luluh mendengar keluhan dari pedagang khususnya ibu-ibu yang kebanyakan sudah berumur.

Selesai mendengar keluhan ibu-ibu yang diselingi deraian air mata, akhirnya Cak Narto tidak meneruskan larangan bagi PKL berjualan di Taman Surya. Sebagai tanda bahwa PKL diperbolehkan berjualan di Taman Surya, Cak Narto memimpin sendiri membuka pintu Taman Surya yang sebelumnya di *gembok*. Setelah ibu-ibu selesai mengeluarkan *uneg-unegnya*, Cak Narto bangkit dari tempat duduknya dan mengajak PKL yang mendatangnya menuju Taman Surya. Cak Narto berjalan di depan kemudian diikuti oleh PKL yang

mendatanginya menuju pintu pagar Taman Surya yang masih di *gembok*. Cak Narto segera memerintahkan pegawai yang membawa kunci pintu pagar Taman Surya segera datang dan memberikannya. Beberapa saat kemudian pegawai yang petugas membawa kunci pagar Taman Surya datang setengah lari dan terlihat ketakutan melihat *bosnya* malam-malam datang ke Balai Kota. Apalagi Cak Narto meminta kunci pintu pagar Taman Surya.

Disaksikan para PKL dan sejumlah pegawai pemerintah kota Surabaya Cak Narto membuka gembok pintu pagar Taman Surya pada malam hari selepas waktu isya' atau sekitar pukul 19.00 WIB. Dibukanya pintu pagar Taman Surya oleh Cak Narto dapat dianggap sebagai tanda bahwa PKL diperbolehkan lagi berjualan di kawasan lapangan depan gedung tempat mengantor Walikota Surabaya. Ketika membuka gembok pintu pagar Taman Surya sebagai tanda bahwa PKL diperbolehkan berjualan, Cak Narto tidak memberikan syarat apa-apa kecuali PKL ditata yang rapi dan dijaga kebersihan Taman Surya. Para PKL kembali lagi dapat mengais keuntungan di Taman Surya. Tempatnya yang strategis menjadikan Taman Surya akhirnya banyak menjadi alternatif bagi PKL ikut-ikutan mengais di tempat yang sama. Semakin hari jumlahnya terus meningkat. Mengingat jumlahnya yang terus meningkat, akhirnya keberadaan PKL di Taman Surya tidak terkontrol lagi.

Seiring dengan semakin menjamurnya PKL di Taman Surya, kesehatan Cak Narto mulai terganggu. Beberapa waktu kemudian akhirnya Cak Narto meninggal dunia. Bagi PKL khususnya di Taman Surya, meninggalnya Cak Narto

berarti kelangsungan nasibnya (berjualan) berada di ujung tanduk. Meninggalnya Cak Narto berarti tiada lagi yang dianggap sebagai *bapake wong cilik*. Tiada lagi yang dianggap sebagai pelindung kelangsungan nasib PKL khususnya di Taman Surya. Karena Cak Nartolah yang mengizinkan PKL berjualan di Taman Surya.

Mengadu ke Elit Parpol dan Kyai

Sepeninggal Cak Narto ke alam baka untuk selama-lamanya, keberadaan PKL di Surabaya mulai dipersoalkan pimpinan kota Surabaya. Atas dasar desakan dan keluhan dari masyarakat akhirnya pemerintah kota Surabaya mulai menertibkan PKL yang tumbuh subur di berbagai sudut kota. Keluhan dari sebagian masyarakat yang mengutarakan bahwa PKL sering memacetkan lalu lintas, melahirkan kekumuhan serta merusak pemandangan akhirnya mendorong pemerintah kota mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan menata dan menertibkan para pedagang di sektor informal yang telah menempati berbagai fasilitas publik seperti trotoar, taman bahkan badan jalan.

Kebijakan walikota Bambang DH mengusir PKL dari Taman Surya tidak begitu saja dapat diterima kalangan pedagang. Berbagai upaya dilakukan agar dapat berjualan kembali di Taman Surya. Para koordinator PKL Taman Surya memutar otak mencari jalan keluar agar PKL tidak diusir. Cara yang ditempuh untuk melawan kebijakan walikota Bambang DH tidak bisa disamakan dengan melakukan perlawanan ketika Cak Narto mengeluarkan kebijakan yang sama: melarang PKL berjualan di Taman Surya.

Perlawanan tidak bisa lagi mengandalkan cara dengan mengetuk belas kasihan walikota. Karena itu cara yang dilakukan kalangan PKL Taman Surya untuk melakukan perlawanan dengan pemerintah kota Surabaya lebih menonjolkan kekuatan massa dan negoisasi. Kekuatan massa ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi ke lembaga-lembaga terkait seperti DPRD, Bagian Perekonomian, Satpol PP atau pemerintah kota Surabaya. Sementara negoisasi dilakukan mulai dengan lembaga birokrasi yang berwenang menata PKL, anggota dewan maupun dengan tokoh masyarakat. Tindakan PKL melakukan unjuk kekuatan massa maupun negoisasi bertujuan agar diperbolehkan berjualan lagi di Taman Surya.

Keputusan pemerintah kota Surabaya tampak sudah bulat membersihkan PKL dari Taman Surya. Pemerintah kota Surabaya bermaksud memfungsikan kembalinya Taman Surya sebagai taman bukan pasar atau tempat jualan. Pasca acara Laris Manis Satpol PP diterjunkan di sekitar Taman Surya untuk menghalau PKL yang ingin berjualan. Ketika para PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Surya tidak diperbolehkan lagi menempati lokasi yang sama, maka terjadi kegelisahan di kalangan pedagang. Pedagang Taman Surya merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kota Surabaya. Di kalangan PKL mempertanyakan kenapa pemerintah kota Surabaya tidak memberikan solusi atau jalan keluar kepada pedagang yang terusir dari Taman Surya. Bagaimanapun lemahnya posisi PKL Taman Surya menghadapi pemerintah kota Surabaya, kalangan

pedagang yang terusir dari tempat berjualannya tetap bereaksi melakukan berbagai usaha agar diperbolehkan berjualan kembali.

Usaha PKL agar diperbolehkan kembali berjualan di Taman Surya tidak hanya melakukan negoisasi langsung dengan pemerintah kota melalui Satpol PP. Tetapi juga melakukan berbagai usaha lain dengan cara meminta tolong kepada pihak-pihak lain yang diharapkan dapat membantu PKL berjualan kembali di Taman Surya. Digambarkan oleh sebagian kalangan PKL —khususnya yang menjadi perwakilan PKL— waktu itu seperti orang akan tenggelam.

Digambarkan oleh informan bahwa ketika orang akan tenggelam apa saja akan dijadikan pegangan. Orang yang akan tenggelam tidak memperdulikan apakah benda yang dipegang dapat menjamin menyelamatkan dirinya atau tidak. Bagi orang yang akan tenggelam apa saja akan dijadikan pegangan, siapa tahu akhirnya dapat menyelamatkan dirinya. Koordinator PKL Taman Surya memberi gambaran situasi ketika kalangan PKL gelisah mencari siapa kira-kira yang dapat menolong mengembalikan ke Taman Surya,

Awalnya PKL hanya mencari dan minta tolong ke teman-teman sesama PKL. Ada informasi seseorang bisa menyelesaikan atau memperjuangkan masalah Taman Surya maka perwakilan PKL mendatangnya. Suatu kali ada informasi bahwa ada orang yang dapat memberi bantuan agar masuk Taman Surya lagi. Ada informasi seseorang yang bernama Arif bisa membantu PKL Taman Surya, maka perwakilan PKL —Pak Mamo bersama Pak Ponimin— segera mendatangi rumahnya di kawasan Kampung Malang Surabaya. Maksud

kedatangannya adalah untuk tujuan meminta tolong mengusahakan agar PKL dapat kembali ke Taman Surya. Pak Arif ini memang orang biasa, tapi menurut informasi bisa melobykan ke walikota. Pada waktu itu setiap ada informasi yang bisa membantu mengembalikan PKL ke Taman Surya maka selalu dicoba. Atau dengan kata lain setiap peluang yang ada selalu di coba.

Setelah mencoba meminta tolong kepada seseorang ---bisa dikategorikan sebagai tokoh masyarakat--- ternyata usaha PKL Taman Surya menemui kegagalan. Ternyata orang yang dianggap dapat membantu masalah PKL Taman Surya tidak membawa hasil. PKL masih tetap tidak diperbolehkan menempati Taman Surya sebagai tempat berjualan. Dengan prinsip setiap ada peluang dicoba, kalangan PKL Taman Surya terus berupaya mencari bantuan ke mana saja asal dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

Di saat berbagai upaya dilakukan PKL agar dapat kembali berjualan di Taman Surya, ternyata ada informasi bahwa pemerintah kota Surabaya akan tetap memfungsikannya sebagai taman. Atau dengan kata lain, Taman Surya tetap tidak dapat digunakan sebagai tempat berjualan sepanjang waktu. Sebelum pemerintah kota Surabaya melarang secara total aktivitas PKL di areal Taman Surya, sebenarnya PKL telah diberi kelonggaran berjualan pada hari Sabtu dan Minggu. Tetapi waktu itu kelonggaran yang diberikan pemerintah kota Surabaya untuk berjualan pada hari Sabtu dan Minggu ternyata di tolak oleh sebagian PKL. Sebagian PKL tetap mengajukan tuntutan harus dapat berjualan di Taman Surya setiap hari.

Sebenarnya sebagian PKL dapat menerima solusi yang ditawarkan pemerintah kota Surabaya, yaitu berjualan di Taman Surya pada hari Sabtu dan Minggu. Tetapi PKL yang dapat menerima solusi ini ternyata ditentang oleh PKL lainnya. Karena kelompok yang dapat menerima solusi yang ditawarkan pemerintah kota Surabaya relatif "lemah" sehingga akhirnya mengalah dan tidak menempati Taman Surya pada hari Sabtu dan Minggu. Sikap menonjol dari kalangan PKL yang tetap *ngotot* menempati Taman Surya setiap hari akhirnya direspon oleh pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya tidak mengabulkan tuntutan PKL yang tetap berkeinginan berjualan di Taman Surya setiap hari. Sebaliknya, justru pemerintah kota Surabaya melarang secara total PKL berjualan Taman Surya.

Sikap tegas pemerintah kota Surabaya yang tetap tidak memperbolehkan lagi berjualan di Taman Surya, akhirnya membuat nyali PKL agak turun. Tuntutan yang diajukan PKL ke pemerintah kota Surabaya bukan berjualan di Taman Surya tetapi meminta tetap diijinkan berjualan di jalan Sedap Malam dan Jimerto. Usaha mempertahankan agar tetap dapat berjualan di jalan Sedap Malam dan Jimerto juga tidak mudah. Pemerintah kota Surabaya belum memberi jaminan bahwa PKL di jalan Sedap Malam dan Jimerto akan tidak digusur lagi.

Beberapa saat menempati jalan Sedap Malam dan Jimerto, ada informasi bahwa PKL akan digusur lagi. Maka kalangan PKL dibuat kalang kabut lagi. Upaya meminta bantuan ke berbagai pihak dicoba lagi. Kalau pertama mencoba meminta bantuan ke tokoh masyarakat, kali ini kalangan PKL ke kalangan

ulama. Kebetulan ulama atau kyai yang dipercaya dapat membantu PKL waktu itu adalah seorang tokoh agama dari Krembangan yang bernama Gus Soleh. Peran keterlibatan Gus Soleh ikut membantu PKL Taman Surya agar kembali berjalan di tempat semula tidak hanya lewat do'a semata. Gus Soleh ikut terjun langsung pada saat rapat-rapat mempersiapkan aksi demo. Pada saat PKL melakukan rapat-rapat di Pogot tempat Pak Rifai, Gus Soleh tampak duduk di depan diantara tokoh-tokoh PKL Taman Surya. Di saat demonstrasi ke DPRD kota Surabaya Gus Soleh juga ikut terlibat langsung di dalamnya. Ketika ada perwakilan PKL Taman Surya di terima oleh wakil DPRD di ruang rapat lantai II, Gus Soleh yang berada di lantai I berusaha menenangkan massa agar tidak berbuat anarkhis. Gus Soleh berusaha keras agar massa PKL sabar menunggu perwakilannya yang sedang melakukan rapat dengan anggota dewan. Keterlibatan dan bantuan yang diberikan Gus Soleh ternyata belum membuahkan hasil. Taman Surya tetap steril dari PKL.

Akhirnya kalangan PKL menemukan nama yang berasal dari tokoh partai, yaitu dari PDIP. Alasan pemilihan tokoh partai dari PDIP untuk membantu masalah PKL, karena walikota Surabaya dijabat oleh orang yang berasal dari PDIP. Para PKL akhirnya meminta tolong ke Pak Nanang Budi yang waktu itu menjadi anggota DPRD Jawa Timur yang kebetulan teman Pak Bambang walikota Surabaya. Pilihan meminta tolong ke Pak Nanang karena sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat. Barangkali melalui Pak Nanang ini bisa membantu PKL agar tidak jadi direlokasi ke THR. Sebelum ke Pak Nanang Budi,

usaha yang dilakukan untuk kembali ke Taman Surya selalu gagal. Pak Nanang Budi kebetulan rumahnya di Pakis Tirtosari dekat rumah Pak Marno, sehingga memudahkan untuk bertemu.

Kalangan PKL juga mengenal Pak Nanang sebagai anggota dewan yang vokal dan membela *wong cilik*. Kedatangan para PKL ke Pak Nanang pada awalnya dikenalkan oleh Pak Parno, kakak dari Pak Marno. Pak Parno ini adalah ajudan dari Pak Nanang Budi. Setelah ada orang yang akan mengenalkan dengan Pak Nanang dan kebetulan rumahnya dekat rumah Pak Marno, maka sebelum ke Pak Nanang berkumpul terlebih dahulu di Pak Marno. Setelah berkumpul di rumah Pak Marno, kemudian pergi ke Pak Nanang bersama-sama. Dengan mengendarai sepeda motor honda Grandnya Pak Ponimin berangkat dari rumahnya di kawasan Pacar Keling sekitar jam 17.00. ke rumah Pak Marno. Sebelum adzan maghrib berkumandang Pak Ponimin sudah sampai di rumah Pak Marno. Setelah lepas maghrib Pak Marno dan Pak Ponimin, diantar pak Parno menuju ke rumah Pak Nanang Budi di Pakis Tirtosari. Pertemuan Pak Marno dan Pak Ponimin dengan Pak Nanang yang pertama berlangsung hingga pukul 24.00 WIB. Pak Ponimin dan Pak Marno segera menceritakan maksud kedatangannya. Pak Ponimin dan Pak Marno mengeluh soal diusirnya PKL dari Taman Surya. Keesokan harinya Pak Nanang Budi mengajak Pak Ponimin, Pak Teguh dan Pak Marno menemui Pak Bambang di Kantornya. Tetapi ketika ada di depan ruangan dinas walikota, ternyata Pak Bambang tidak mau menerima kedatangan Pak Nanang. Alasannya karena Pak Nanang mengajak PKL. Pak Nanang waktu itu

sempat terlihat kesal kepada Pak Bambang. Karena sebelumnya antara Pak Nanang dan Pak Bambang sudah janji dapat bertemu, tetapi ketika datang di ruang dinas Pak Bambang tidak mau menerimanya. Selain dengan Pak Nanang Pak Ponimin selaku ketua KOPYA sudah berusaha menemui Pak Bambang sebagai walikota Surabaya hingga sampai empat kali. Tapi tak satupun Pak Bambang bersedia menemui perwakilan PKL. Setelah kenal dengan Pak Nanang, hari-hari berikutnya Pak Ponimin dan Pak Marno sering berada di rumah elit PDIP ini hingga dinihari. Tak jarang Pak Ponimin dan Pak Marno baru pulang dari rumah Pak Nanang jam 2 atau jam 3 dinihari. Tetapi usaha yang dilakukan Pak Nanang Budi untuk membantu ex PKL Taman Surya ternyata juga mentok tak membuahkan hasil.

Kalaupun tidak bisa kembali ke Taman Surya, Pak Ponimin dan Pak Marno meminta tolong ke Pak Nanang Budi agar dapat berjualan di jalan Sedap Malam atau Jimerto. Para PKL menolak dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR). Karena pemindahan itu sama saja dengan membunuh pelan-pelan PKL. Para PKL telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa di THR bukan tempat yang cocok untuk berjualan. Kalangan PKL mengetahui bahwa THR lokasinya sepi. Ketika Pak Narto menjadi walikota, pernah setiap sore PKL yang berjualan di THR diberi uang rata-rata Rp 20.000,-, itupun tidak bisa bertahan. Di THR barang dagangan tidak laku. Di kawasan THR terdapat Siswobudoyo, dan Srimulat juga tidak laku. Ada pengelola pertokoan Sasana Boga, juga kalah dengan plaza-plaza lainnya. Di THR diadakan acara dangdut juga tetap tidak bisa ramai pengunjung.

Ternyata ketokohan dari partaipun tidak menjamin dapat membantu keberhasilan usaha-usaha yang diinginkan PKL. Setelah Pak Nanang Budi tidak berhasil, tidak bisa membantu tetap bertahan berjualan di Taman Surya, akhirnya PKL sudah kacau. Antara pengurus atau koordinator dipecah-pecah, sehingga ada sebagian mau menerima masuk THR tetapi ada sebagian lainnya menolak. Jaringan sosial lainnya yang dicoba dibangun PKL Taman Surya adalah dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Waktu itu sebagian PKL (khususnya dari sisi Barat Taman Surya) mencoba meminta bantuan kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Usaha meminta tolong ke pihak APKLI inipun ternyata belum membuahkan hasil yang diharapkan PKL. PKL Taman Surya tetap digusur dan direlokasi ke THR.

Setiap kali akan demonstrasi ke lembaga-lembaga terkait seperti DPRD atau pemerintah kota Surabaya para PKL mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat pada hari sebelumnya. Biasanya rapat mempersiapkan demonstrasi yang akan dilakukan keesokan harinya, berakhir hingga malam hari. Berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada saat demonstrasi menjadi bagian agenda yang dibicarakan pada waktu persiapan.

Tempat lokasi rapat setiap akan melakukan demonstrasi berada di jalan Pogot, yaitu sekretariat APKLI, Jawa Timur. Di tempat ini terdapat bangunan yang dapat memuat sekitar 200 orang lebih. Bangunan ini lantainya sudah terbuat dari keramik warna putih berukuran 30x30 cm. Bangunan ini dirancang

untuk tempat pentas-pentas, karena di salah satu sisi lantai dibuat lebih tinggi dibanding lantai lainnya. Di tempat yang lebih tinggi inilah para tokoh atau pimpinan PKL merencanakan setiap aksi bersama sesama PKL lainnya yang duduk di bagian lantai yang lebih rendah.

Dalam rapat persiapan aksi –yang selalu dilaksanakan pada malam hari– tidak hanya membahas bagaimana langkah-langkah melakukan aksi keesokan harinya. Tetapi dibahas juga siapa yang akan mewakili PKL berdialog dengan kalangan legislatif maupun eksekutif. Termasuk di dalamnya berapa pamlet dan spanduk yang akan dibawa serta tulisan apa saja yang diperlukan. Pembagian tugas siapa yang menulis kata-kata baik dalam spanduk maupun pamlet tak ketinggalan menjadi salah satu agenda yang dibicarakan.

Sumberdaya yang mendukung aksi seperti minuman atau makanan ringan yang diperlukan selama aksi demonstrasi biasanya tidak banyak dibicarakan pada rapat-rapat persiapan aksi. Makanan ringan dan minuman tidak dianggap sebagai sarana yang dianggap penting. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya soal makanan ringan dan minuman sudah tersedia pada saat aksi perlawanan berlangsung. Ketika aksi perlawanan dilakukan ada saja PKL yang secara sukarela membawa makanan maupun minuman. Seringkali minuman air kemasan dalam gelas yang di bawa salah satu PKL.

Dilihat dari tempatnya, PKL Taman Surya secara umum melakukan persiapan perlawanan di dua tempat. Ketika melakukan perlawanan dengan cara mendatangi Cak Narto yang disebut “ekonomi belas kasihan”, rapat

persiapan diadakan di lokasi berjualan, yaitu di Taman Surya. Kedua ketika melakukan demontrasi ke DPR dan Pemerintah kota Surabaya, persiapan rapat dilakukan di tempat pengurus APKLI.

Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para PKL Taman Surya telah mencoba mempersiapkan diri melakukan perlawanan dengan membangun jaringan sosial baik ke internal PKL maupun ke pihak luar. Ketika melakukan mengadu ke Cak Narto, para pedagang membangun jaringan sosial hanya sebatas kalangan internal PKL yang berada di Taman Surya. Pilihan jaringan sosial seperti ini, karena waktu itu situasi yang dihadapi masih dapat diatasi oleh PKL Taman Surya sendiri.

Tetapi ketika PKL Taman Surya sudah tidak bisa mengatasi persoalan yang dihadapi, maka berusaha membangun jaringan sosial yang bersifat eksternal. PKL Taman Surya mencoba membangun jaringan sosial ke pihak-pihak lain yang dianggap dapat membantu penyelesaian yang menguntungkan pihaknya. Ketika menghadapi program relokasi PKL ke THR, jaringan sosial yang pernah dibangun antara lain ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM.***

Konflik Internal PKL

Aksi perlawanan yang dibangun PKL Taman Surya pada dasarnya termasuk pada tindakan yang terorganisasi, bukan dilakukan atas perseorangan atau individu. Ketika PKL digusur baik dari Taman Surya, jalan Sedap Malam,

Jimerto maupun Wijaya Kusuma, tidak memungkinkan melakukan perlawanan perseorangan atau individu seperti temuan Scott bahwa perlawanan dapat dilakukan secara individual. Ketika PKL digusur dari Taman Surya, pintu pagarnya ditutup dan dikunci. Selain itu di tiga sisi –Barat, Selatan dan Timur– di jaga oleh petugas dari aparat Dispol PP. Demikian juga ketika PKL digusur dari jalan Sedap Malam, di ujung jalan Utara dan Selatan ditempatkan petugas dari Dispol PP untuk menghalau pedagang. Pada saat itu PKL yang tergusur terpaksa menerima kebijakan pemerintah kota yang semakin menjauhkan dari Taman Surya. Ketika PKL harus pindah dari Wijaya Kusumapun, tidak ada pedagang yang mencoba bertahan. Di kalangan PKL dihantui ketakutan, karena waktu itu ada informasi, kalau pedagang tidak menerima kebijakan pemerintah kota maka selamanya tidak akan bisa berjualan di seantero Surabaya.

Kuatnya tekanan dari pemerintah kota mengakibatkan kalangan ex PKL Taman Surya merapatkan barisan diantara sesamanya. Aksi perlawanan yang dilakukan diorganisir oleh kelompok PKL baik atas nama Kelompok Pedagang Taman Surya (Kopya) maupun kelompok ex. PKL Taman Surya. Sebelum melakukan aksi perlawanan, didahului dengan rapat-rapat untuk mempersiapkannya. Setelah melalui rangkaian rapat yang membicarakan apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan aksi perlawanan, baru tindakan demonstrasi dilakukan pada esok harinya.

Di Taman Surya terdapat dua kelompok. Areal Taman Surya terbagi menjadi dua. Dari tengah lapangan Taman Surya, yaitu dari air mancur ke arah

ke Timur menjadi kelompok tersendiri. Kelompok PKL di sisi Timur ini memiliki ketua sendiri. Sementara dari air mancur ke sebelah Barat ada kelompoknya sendiri dan ada juga ketuanya. Jadi di Taman secara umum ada dua kelompok PKL, yaitu sisi Timur dan Barat. Kendati demikian di Taman Surya sebenarnya disatukan oleh satu kelompok. Karena itu di Taman Surya ada ketua PKL yang mengaku menjadi ketua umumnya, yaitu membawahi kelompok Barat dan Timur. Pak Ponimin menjelaskan,

"....saya sebelumnya kan ketua PKL disitu, di Taman Surya. Saya punya kartu anggotanya. Nama kelompok PKL Taman Surya, saya beri nama KOPYA singkatan dari Kelompok Pedagang Taman Surya. Istilahnya saya yang memberi nama. Maksud saya dapat mengatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai terjadi kekotoran. Semua PKL Taman Surya menjadi anggota, tapi ada tetapinya. Setiap blok ---ada blok Timur dan Barat terdapat ketuanya sendiri-sendiri ---, saya ketua umumnya.

Adanya dua kelompok PKL --sisi Barat dan Timur--di Taman Surya ternyata menyimpan potensi konflik antara keduanya. Secara umum kedua kelompok PKL di Taman Surya memang berbeda baik asal daerah maupun barang dagangan yang dijualnya. PKL yang berada di sisi Barat hampir keseluruhan adalah berasal dari etnis Madura. Sementara di sisi Timur, hampir secara keseluruhan bukan dari orang-orang Madura tetapi sebagian besar berasal dari orang Jawa.

Menurut informasi, PKL yang lebih dahulu berada di Taman Surya adalah di sisi Timur. Karena itu ketua kelompok PKL sisi Timur lebih memilih memelihara dan menjaga Taman Surya sehingga dapat menjamin kelangsungan berjualan tanpa ada kekhawatiran digusur pemerintah kota. Berbagai upaya

dilakukan misalnya mengajak semua PKL yang berjualan di Taman Surya tetap menjaga kebersihan dan keindahan di tempat berjualan. Tetapi upaya yang dilakukan ini –menurut ketua kelompok sisi Timur adalah bertujuan baik— ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari seluruh PKL Taman Surya. Sebaliknya upaya yang bertujuan menjaga “nama baik” PKL Taman Surya di mata kelompok sisi Barat justru melahirkan rasa antipati bahkan cenderung ke rasa permusuhan. Koordinator PKL sisi Timur menjelaskan,

"...kebetulan antara saya dengan blok Barat terjadi "perselisihan" jauh sebelumnya. Yaitu jauh sebelum PKL Taman Surya digusur pasca pameran dan Laris Manis. Awal mula terjadinya "perselisihan" itu dikarenakan niat baik --menurut saya sih bermaksud baik, tapi ndak tahu— yang saya jalankan justru memicu munculnya ketegangan antara saya dengan kelompok atau blok Barat. Blok Barat itu kan orang Madura, --hampir semua balok Barat orang Madura, ada satu dua non Madura yang berjualan minuman, atau jagung bakar— sementara yang non Madura tidak banyak artinya. Orang-orang Non Madura di sisi Barat tidak banyak bersuara, manut saja. Nah orang-orang Madura yang jumlahnya hampir seratus persen itu sebagian besar berjualan pakaian "second" terutama pakaian dari luar negeri atau import. Pakaian "second" itu kan membuat kotor. Saya mencoba merapikan itu semua, tapi ndak mau. Ya akhirnya terjadi "clas" tadi.

Bibit konflik yang sudah tumbuh antara blok/sisi Barat dan Timur terus terpelihara. Perkembangannya kemudian justru potensi konflik tidak hanya menyangkut internal PKL Taman Surya. Tetapi potensi konflik PKL Taman Surya telah melibatkan pihak luar. PKL yang berasal dari sisi Barat meminta kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang Taman Surya. Karena itu menurut pihak sisi Barat, APKLI bukan pihak luar yang akan melakukan intervensi ke PKL

Taman Surya. Tetapi PKL Taman Surya dianggap sebagai bagian dari APKLI. Karena itu apa yang dihadapi PKL Taman Surya merupakan masalah yang harus diselesaikan APKLI.

Tetapi bagi PKL sisi Timur, masalah PKL Taman Surya harus dipecahkan sendiri oleh mereka sendiri. PKL sisi Timur meyakini bahwa apa yang terjadi pada PKL Taman Surya akan dapat dipecahkan dan diselesaikannya sendiri. PKL sisi Timur meyakini, bahwa yang mengetahui segala persoalan dan seluk beluk serta memecahkannya adalah PKL Taman Surya sendiri, bukan pihak luar. Tetapi pandangan dan keyakinan PKL sisi Timur yang tidak menghendaki mengundang pihak dari luar tidak terlaksana. Pada akhirnya APKLI tetap terlibat turut serta memecahkan permasalahan yang dihadapi PKL Taman Surya. Tetapi ketua KOPYA sisi Timur sebenarnya tetap menghendaki yang mengurus dan mengatur PKL Taman Surya adalah dari Taman Surya sendiri. Tetapi karena pihak PKL – terutama dari pihak Barat– akhirnya APKLI turut membantu memperjuangkan ex PKL Taman Surya.

Sebelum ada pameran yang diselenggarakan Citra Pamerindo di Taman Surya, di kalangan PKL sudah terjadi konflik antar sesamanya. Pangkalnya berasal dari soal siapa yang akan memimpin PKL Taman Surya di masa-masa mendatang. PKL sisi Barat tetap menghendaki, pimpinan PKL Taman Surya diserahkan kepada APKLI. Karena suara PKL Taman Surya yang menghendaki APKLI ikut serta ambil bagian tidak bisa dibendung, akhirnya keinginan PKL sisi Timur tidak terkabulkan. Kehendak PKL Taman Surya di pimpin oleh mereka

sendiri akhirnya kandas. Satu bulan sebelum ada acara pameran, sudah ada gejala masalah siapa yang memimpin kita –PKL Taman Surya--. Akhirnya jauh sebelum ada acara pameran Citra Pamerindo, PKL Taman Surya sudah dikendalikan oleh APKLI. Rapat-rapat sudah dipimpin oleh APKLI. Sebelum ada acara pameran Citra Pamerindo rapat-rapat sudah dipimpin oleh APKLI. Setelah acara pameran Citra Pamerindo selesai, kita (PKL) Taman Surya digusur, PKL tak boleh masuk lagi. APKLI memang mengusahakan agar PKL dapat kembali ke Taman Surya, tapi usaha itu sia-sia. PKL tetap dilarang berjualan di Taman Surya.

Mempersiapkan Demonstrasi

Setelah ada pengusuran dari Taman Surya, kalangan PKL merapatkan barisan dengan membentuk kepengurusan baru. Kepengurusan baru ini sudah berbeda dengan kepengurusan sebelumnya yang bernama KOPYA. Kepengurusan baru yang dibentuk setelah pengusuran PKL dari Taman Surya dinamakan ex PKL Taman Surya. Karena itu ketuanya juga hanya disebut sebagai ketua ex PKL Taman Surya.

Proses pemilihan ketua dilakukan secara demokratis dilakukan di sekretariat APKLI yang berada di kawasan Pogot. Pada waktu itu pemilihan dilakukan pada waktu malam hari selepas waktu sholat isya'. Pada waktu itu yang hadir cukup banyak kira-kira 200 orang. Setiap PKL yang hadir ketika acara pemilihan pengurus --ketua dan wakil ketua-- diberi kertas suara untuk memilih

siapa yang akan menjadi wakil PKL di masa-masa selanjutnya. Sebelum acara pemilihan dilakukan maka dijanging dulu siapa-siapa yang layak dijadikan ketua. Sesaat kemudian dari kalangan peserta muncul nama Pak Kirman dan Pak Ponimin. Nama Pak Kirman lebih banyak dimunculkan oleh PKL yang berada di

sisi Barat. Sebaliknya Pak Ponimin lebih banyak disuarakan oleh PKL dari sisi Timur.

Ketika sudah ada nama-nama calon ketua dan wakil ketua maka, surat suara dibagikan keseluruh pedagang yang hadir. Setelah setiap pedagang yang hadir menerima kertas suara maka dipersilahkan menulis nomor atau nama calonnya. Pak Kirman mendapat nomor urut 1 sementara Pak Ponimin mendapat nomor urut 2. Akhirnya terpilih Pak Kirman sebagai ketua dan Pak Ponimin sebagai wakilnya. Kedua orang ini kemudian menjadi wakil PKL Taman Surya melakukan berbagai rapat-rapat membicarakan nasib PKL.

PKL Taman Surya yang telah tergusur —ex. PKL Taman Surya—melakukan perlawanan dengan cara berdemonstrasi ke lembaga terkait terutama DPR sebanyak 3 (tiga) kali. Setiap kali akan berdemonstrasi, para PKL Taman Surya mengadakan rapat persiapan terlebih dahulu di Pogot. Dalam rapat persiapan demonstrasi yang akan dilakukan keesokan harinya, agenda utamanya adalah membicarakan strategi yang akan dilakukan ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Apa saja yang perlu diantisipasi ketika demonstrasi berlangsung

menjadi agenda lainnya dalam rapat persiapan. Biasanya rapat persiapan demonstrasi dilakukan pada malam hari, sementara itu aksi akan dilakukan pada esok harinya/pagi harinya. Salah satu informan menjelaskan,

"...ketika APKLI masuk ke PKL Taman Surya, akhirnya kita rapat-rapat di Pogot membicarakan strategi kita demonstrasi. Waktu itu kita melakukan demonstrasi besar-besaran hingga 3 kali. Setiap kali akan demonstrasi kita di rapatkan dulu di Pogot..."

Di Pogot terdapat tempat berukuran kira-kira lebar 7 meter dan panjang kira-kira 12 meter dekat rumah Pak Rifai. Tempat ini berada di sebelah Barat rumah Pak Rifai. Di bangunan ini pada bagian sisi Utara dibuat mirip panggung, sehingga tempatnya agak tinggi. Di bagian yang meninggi ini berukuran lebar tinggi 1 meter, lebar 3 meter dan panjang 12 meter (sepanjang bangunan yang ada). Lantainya sudah terbuat dari keramik berwarna putih. Ketika merencanakan demo-demo menentang relokasi ke THR, tempat inilah yang dipakai merencanakan demo-demo yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Biasanya pada rapat-rapat membahas strategi demo, Pak Rifai, Pak Ponimin, Pak Khoiron, Gus Soleh, Abah Ali (Haji Ali) dan Pak Kirman duduk di bagian yang meninggi (seperti panggung) sementara para PKL duduk lesehan di hadapannya di sisi Selatan bangunan yang tinggi seperti panggung pertunjukkan. Menurut Informasi, bentuk bangunan yang meninggi tersebut, memang diperuntukkan sebagai panggung ketika ada pertunjukkan. Setiap kali rapat membahas demo PKL Taman Surya tak kurang 100 hingga 300 orang berkumpul di tempat ini.

Selama menuntut agar PKL dapat berjualan kembali di Taman Surya, tidak ada yang melakukan perlawanan dengan cara individu atau perseorangan. Tidak ada satupun PKL, misalnya tetap nekat atau memaksa menggelar dagangannya di Taman Surya. Waktu dilarang berjualan di Taman Surya, tidak ada PKL yang mencoba 'main kucing-kucingan' dengan aparat pemerintah kota --Satpol PP— dengan cara sembunyi-sembunyi tetap berjualan.

".... waktu itu Taman Surya sudah bersih dari PKL. Ndak ada yang berani berjualan di sana (Taman Surya, penulis), lha di sana dijaga oleh Satpol PP, gimana mau jualan. Satpol PP itu patroli keliling Taman Surya, jadi kalau kalau ada yang mau jualan segera dihentikan..."

Perlawanan secara individual, memang tidak memungkinkan dilakukan pada saat pemerintah kota melarang PKL berjualan di Taman Surya. Pemerintah kota Surabaya tidak sekedar melarang PKL berjualan di Taman Surya, tetapi diikuti dengan tindakan konkrit menerjunkan aparat Satpol PP untuk menjaganya. Setiap hari Taman Surya di jaga oleh Satpol PP dengan cara berpatroli. Praktis kalau ada PKL yang mencoba tetap berjualan akan sangat mudah dihalau. Ketatnya penjagaan Taman Surya oleh Satpol PP menjadikan PKL tidak berani melakukan "pembangkangan" secara terselubung apalagi secara terbuka terhadap pemerintah kota Surabaya.

Selain tindakan fisik berupa pengusuran secara bertahap, pemerintah kota Surabaya melakukan "pengusuran psikologis". Tindakan ini diwujudkan lewat tekanan psikologis kepada PKL yang tidak mengikuti kehendak pemerintah kota Surabaya. Akibatnya banyak diantara PKL yang tidak lagi memiliki alternatif

pilihan kecuali mematuhi program relokasi ke THR. Pak Khoiron menjelaskan bahwa,

"...mereka-mereka yang mau pindah ke THR beranggapan bahwa mempertahankan tempat yang sudah ada tak mungkin bisa.—Jimerto, Sedap Malam, kompleks SMA nggak mungkin bisa,— sampai jalan raya tak mungkin bisa. Jadi mereka ketakutan dan oleh pemerintah ditakut-takuti juga. Pada saat itu turun semua, camat, lurah, memberitahu kalau kamu — PKL— nggak mau pindah ke THR, kamu nggak akan dapat tempat, di manapun di Surabaya termasuk di THR. Jadi PKL takut, sehingga terjadi kegelisahan, akhirnya menerima pindah di THR..."

Di saat PKL sedang giat-giatnya berusaha mencari pihak yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, pemerintah kota juga berusaha keras mensukseskan kebijakannya melakukan relokasi. Berbagai upaya dilakukan agar relokasi ke THR dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Disamping pemerintah kota melakukan "teror" psikologis berupa ungkapan bahwa PKL yang tidak mau pindah ke THR tidak akan mendapatkan tempat jualan di seluruh wilayah Surabaya, juga menyusupkan orang ke dalam PKL.

Pada saat PKL berusaha mencari bantuan ke berbagai pihak, ternyata pemerintah kota Surabaya berusaha mengadu domba PKL. Ketika PKL berjualan di Sedap Malam dan Jimerto, pemerintah kota ternyata memasukkan pedagang dari luar Taman Surya dan kemudian mengangkatnya menjadi Ketua PKL. Pada saat itu ada dua orang yang dimasukkan pemerintah kota ke dalam PKL Jimerto dan Sedap Malam. Satu perempuan bernama Bu Erna dan yang laki-laki bernama Roni. Masuknya dua orang ini tentu ganjil sekali, karena sedang dalam posisi diujung tanduk —digusur-gusur— ada orang yang ikut berjualan. Di

kalangan PKL kemudian mencari berbagai informasi tentang dua orang pedagang baru yang ikut jualan. Akhirnya ex PKL Taman Surya mengetahui bahwa kedua orang baru itu adalah pedagang yang disusupkan oleh pemerintah kota. Pada saat itu situasi ex PKL Taman Surya terjadi kekisruhan, sehingga PKL tidak hafal satu-satu, tapi kalangan PKL mengetahui bahwa dua orang itu adalah orang baru. Reaksi PKL waktu itu sempat marah, ada PKL yang mau memukuli kedua orang baru tersebut. Tetapi karena yang lain mencegah akhirnya kedua orang itu dibiarkan. Kalangan PKL menyadari bahwa nggak mungkin terjadi pertumpahan darah gara-gara dua pedagang baru, sementara masih ada permasalahan yang lebih besar harus diselesaikan.

Kendati PKL melakukan perlawanan bertubi-tubi baik dengan cara demonstrasi (hingga 3 kali) maupun membangun jaringan sosial dengan tokoh masyarakat, partai politik maupun ulama (kyai) ternyata tidak membuahkan hasil. Perlawanan yang dibangun PKL akhirnya dapat dipatahkan oleh pemerintah Kota Surabaya. PKL akhirnya dipindah ke THR, sementara yang menolak mencari tempat sendiri-sendiri, baik di pasar maupun mengikuti bazaar-bazaar keliling.

Dari uraian sub bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlawanan PKL Taman Surya mempertahankan Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto maupun jalan Wijaya Kusuma (Komplek SMA) dilakukan secara terorganisir. Perlawanan ini dikoordinasi oleh kelompok ex PKL Taman Surya. Setiap akan

melakukan perlawanan selalu didahului dengan merapatkan barisan melalui rapat persiapan pada malam hari sebelumnya.

Ketika kalangan PKL mencoba mengorganisasikan diri, sebaliknya pemerintah kota Surabaya berusaha memecahkannya. Pemerintah kota waktu itu berusaha memecah belah PKL baik kalangan pengurus maupun pedagang biasa. Di saat PKL sedang membangun solidaritasnya, pemerintah kota memasukkan orang luar ke dalam PKL Taman Surya yang sedang berjualan di jalan Sedap Malam dan Jimerto. Bahkan pedagang baru yang dari luar ini kemudian mengangkat dirinya menjadi ketua. Adanya pedagang baru ini tentu sangat ganjil karena di saat PKL sedang dipindah apalagi terancam digusur, kenapa ada pedagang yang justru bergabung.

Situasi Taman Surya yang dijaga secara ketat oleh Satpol PP menjadikan perlawanan yang bersifat individual baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tidak dilakukan oleh PKL. Sementara tekanan psikologis yang disampaikan pemerintah kota Surabaya semakin menghilangkan alternatif pilihan bagi PKL untuk bertahan atau melawan. PKL mau tidak mau harus menerima program relokasi PKL ke THR. Bagi yang menolak harus menanggung konsekwensi tidak mendapat jatah stand di THR, sebaliknya harus mencari tempat sendiri.*

Bentuk-Bentuk Perlawanan

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya dalam menyiasati intervensi yang dilakukan aparat pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan relokasi adalah dengan demonstrasi ke DPR dan demonstrasi ke Balaikota dengan kekerasan fisik. Disamping melakukan perlawanan dalam bentuk demonstrasi, ex PKL Taman Surya juga melakukan negoisasi ke pemerintah kota Surabaya melalui Satpol PP. Setiap bentuk perlawanan tidak dapat dilepaskan dari situasi pada saat akan melakukan aksi. Perbedaan situasi akhirnya menyebabkan bentuk-bentuk aksi perlawanan tidaklah seragam.

Pertama, Perlawanan dengan demonstrasi. Ketika Cak Narto digantikan walikota Bambang DH, PKL mulai tidak mendapat dukungan dari pemerintah kota terutama walikota. Berbeda dengan Cak Narto yang menerima PKL tumbuh dan berkembang di kota Surabaya, walikota Bambang DH mulai bersikap hati-hati menerima PKL menjadi bagian dari perkembangan kota. Atas dasar desakan dari masyarakat, akhirnya walikota Bambang DH bersikap tegas terhadap PKL. Atas dasar keluhan masyarakat bahwa PKL banyak menimbulkan permasalahan di kota Surabaya, akhirnya pemerintah tidak lagi mentolelir keberadaan PKL terutama di jalur-jalur protokol.

Sikap tegas terhadap PKL tercermin juga ketika Taman Surya dilarang atau tertutup bagi pedagang. Berbagai acara yang memaksa PKL Taman Surya minggir dan akhirnya hengkang selamanya atau tidak diperbolehkan berjualan lagi. Pelarangan Taman Surya sebagai tempat transaksi jual-beli tidak hanya

berupa surat edaran atau himbauan. Tetapi pelarangan Taman Surya sebagai tempat berjualan PKL diikuti dengan penegakannya. Pemerintah kota Surabaya menugaskan Satpol PP untuk menjaga dan menghalau PKL yang akan kembali berjualan di Taman Surya.

Boks 4 PKL Ngotot Bertahan di Taman Surya

Masih soal relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Taman Hiburan Rakyat, Kelompok Pedagang Kaki Lima Taman Surya (KOPYA) mendesak Pemkot Surabaya agar tetap diizinkan bertahan di Taman Surya. Desakan itu dilakukan karena mereka tidak tertampung di THR.

Untuk itu, Rabu (14/8/2002), mereka ngeluruk ke gedung DPRD Surabaya yang kemudian diterima di Komisi B. Tapi dalam pertemuan yang dihadiri Dispol PP, Bagian Perekonomian, UPTD THR dan perwakilan PKL sendiri itu belum menemukan titik temu.

Pasalnya Pemkot Surabaya tetap bersikukuh menetapkan bahwa Taman Surya, jalan Sedap Malam dan jalan Wijaya Kusuma sebagai behas PKL. Sedang KOPYA dijanjikan untuk ditampung di THR. Padahal, kapasitas THR hanya sanggup menampung sekitar 350 PKL, sementara jumlah PKL di tiga lokasi itu sebanyak 700 PKL.

"Saya minta kepada semua pihak untuk bersabar, program ini kan belum berjalan," kata Anef Indryanto, ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Sementara itu di luar gedung dewan ratausan PKL dan KOPYA menggelar aksi. Mereka berkumpul menunggu hasil rapat wakilnya dengan Komisi B dan instansi terkait dengan menggelar beberapa poster yang berisi seruan agar mereka tetap diperkenankan berjualan di Taman Surya.

Diantara poster yang dibebankan itu bertuliskan "Pencuri Ditembak, sedangkan PKL Digusur" dan "Kami Hanya Ingin Mengan Makan, Mengapa Dilarang". Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.

Aksi mereka ini dilakukan setelah mereka merasa pesimis bisa ditampung di THR, mengingat keterbatasan tempat yang disediakan Pemkot. Sebab kalau tidak tertampung, mereka khawatir tidak bisa berjualan lagi karena lahan yang sebelumnya ditempati dinyatakan bebas dari PKL.

Sementara itu, koordinator PKL Taman Surya, Pudinim, mengatakan jika relokasi di THR tersebut tidak akan berhasil, selama tidak didukung beberapa fasilitas umum, seperti benzerangan. "Saya yakin mereka akan kembali ke pinggir jalan," katanya. (rn, Radar Surabaya 15/8/2002)

Kerasnya sikap pemerintah kota terhadap PKL menyebabkan bentuk perlawanan tidak sama ketika menghadapi Cak Narto. Perlawanan yang dibangun kalangan ex PKL Taman Surya tidak lagi dengan cara menggugah rasa belas kasihan walikota Bambang DH. Tetapi perlawanan yang dilakukan adalah dengan cara demonstrasi unjuk kekuatan massa. Selain itu disertai juga dengan orasi dan membentangkan poster atau spanduk setiap melakukan aksi demonstrasi.

Demonstrasi PKL ke DPRD kota Surabaya dengan cara mengerahkan massa terjadi hingga 3 (tiga) kali. Ketika melakukan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, pesertanya tidak sampai bertindak anarkhis. Demonstrasi yang dilakukan masih dalam batas normal atau wajar. Setiap melakukan demonstrasi selalu disertai poster, spanduk dan orasi. Setiap kali demonstrasi, ada perwakilan PKL yang diterima oleh DPRD. Tetapi sayang demonstrasi yang dirancang oleh mereka sendiri (PKL) tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Pagi hari sesuai dengan kesepakatan rapat pada malam harinya rapat di Pogot, sejak pukul 07.00 WIB para PKL sudah mulai berdatangan di jalan Yos Sudarso depan gedung DPRD kota Surabaya. Masing-masing PKL datang sendiri dari rumahnya, karena pada malam harinya sudah disepakati bahwa tempat berkumpul langsung di gedung DPRD kota Surabaya. Ketika datang ke jalan Yos Sudarso, ada PKL yang menggunakan sepeda motor, menggunakan angkutan kota bahkan ada yang jalan kaki. Di jalan Yos Sudarso ujung Utara –dekat Taman Surya– terlihat PKL yang akan ikut demonstrasi beriringan berjalan kaki.

Di tangan mereka terdapat karton warna-warni, seperti putih, hijau, merah dan kuning yang masih digulung melingkar. Sementara itu di jalan Gubernur Suryo tepatnya di depan gedung Grahadi juga tampak iring-iringan orang berjalan menuju ke arah Timur. Di tangan sebagian orang yang berjalan ini juga terdapat gulungan kertas karton yang berwarna-warni.

Sesaat kemudian kira-kira jam 07.30 WIB, semakin banyak PKL yang datang di gedung dewan. Setelah negoisasi dengan penjaga pintu akhirnya PKL yang akan berdemo memasuki halaman gedung dewan. Ketika masih di luar pagar pintu sebagian PKL sudah membagikan kertas karton yang berisi berbagai tulisan permintaan PKL kembali ke Taman Surya ke sesamanya yang ada di sekitarnya. Para PKL berjalan ke arah pintu gedung dewan yang berada di sebelah Timur, tepat di tengah-tengah bangunan.

Karena keterbatasan ruangan, maka akhirnya beberapa saat kemudian perwakilan PKL disuruh memasuki di ruang rapat di lantai II. Sekitar pukul 08.00 WIB perwakilan di terima anggota dewan. Sebelum memasuki ruang rapat yang ada di sebelah Utara dari pintu tangga, perwakilan PKL diterima Pak Basuki – waktu itu ketua DPDR kota Surabaya– di ruangnya. Ruangan Pak Basuki berada di lantai II ruang nomor dua dari arah Timur (sebelah Selatan pintu tangga menuju lantai II). Di lantai II gedung DPRD kota Surabaya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Di bagian Selatan terbagi menjadi 4 ruangan. Ruangan Pak Basuki ada di nomor dua dari arah Timur. Sementara di bagian utara juga terbagi menjadi 4 ruangan. Setelah

perwakilan PKL menghadap dan diterima Pak Basuki, perwakilan PKL mendapat surat memo untuk menghadap pak Herman Rifai di ruang rapat yang berada di bagian Utara. Tempat ruangan rapat untuk menerima perwakilan tepat berada di depan ruangan Pak Basuki. Akhirnya perwakilan diterima oleh Pak Herman Rifai di ruangan rapat, tepat di depan ruang Pak Basuki. Di ruangan rapat tempat menerima perwakilan terdiri dari tiga meja berbentuk ukuran besar. Satu Meja berbentuk melingkar cenderung lonjong dan dua meja panjang persegi empat berukuran kira-kira lebar 1 meter dan panjang kira-kira 4 meter.

Pintu masuk ruang rapat berada di sisi sebelah Barat. Tempat meja yang berbentuk persegi panjang berada di bagian Selatan ruangan. Jumlah meja berukuran dan bentuk persegi panjang ini terdapat 2 buah. Masing-masing meja ini terdapat sebanyak enam kursi. Posisi kursi ada di sebelah Selatan meja. Dengan demikian posisi tempat duduk kursi memanjang ini menghadap ke sebelah Utara. Sementara itu meja yang berbentuk lingkaran sedikit lonjong berada di tengah ruangan. Di sekeliling meja berbentuk melingkar agak lonjong ini terdapat sebanyak 20 kursi. Waktu ada perwakilan PKL, Pak Herman Rifai duduk di deretan kursi meja bundar sebelah Timur. Sementara perwakilan PKL yang terdiri dari Pak Ponimin, Pak Khoiron, Pak Kiman dan Pak Marno duduk di deretan kursi yang ada di meja memanjang dari Timur-Barat dekat pintu masuk ruangan. Posisi PKL menempati deretan kursi yang berada di barisan sebelah Utara dekat meja yang di tengah (lonjong).

Pada saat perwakilan PKL diterima Pak Herman Rifai, di luar gedung DPRD kota Surabaya bagian bawah (lantai I) berlangsung para PKL sedang berorasi sambil membawa pamlet atau spanduk. Di bagian halaman gedung DPRD kota Surabaya ini ikut serta Pak Rifai dari APKLI dan Gus Soleh –seorang Kyai dari Krembangan— yang berusaha menenangkan massa pendemo agar bersabar menunggu perwakilan yang diterima anggota dewan. Di dalam ruang rapat terjadi perdebatan sengit antara perwakilan dengan Pak Herman Rifai. Karena di satu sisi PKL tetap bersikeras berjualan kembali di Taman Surya, sementara anggota dewan belum bisa mengambil keputusan. Rapat baru berakhir sekitar pukul 12.30 WIB tanpa ada keputusan yang menggembirakan kalangan PKL. Setelah keluar ruangan dan berada di lantai I Pak Ponimin menggelar orasi, yang salah satu isinya adalah PKL harus menunggu proses lebih lanjut. Rapat yang baru saja selesai belum menghasilkan keputusan yang menggembirakan bagi PKL.

Selang tiga hari berikutnya para ex PKL Taman Surya mengadakan demonstrasi lagi ke gedung dewan. Seperti biasanya sebelum demonstrasi dilakukan pada malam harinya selalu mengadakan rapat di Pogot. Seperti demonstrasi sebelumnya PKL yang akan berdemo langsung menuju gedung dewan. Sejak pukul 07.00 WIB mulai banyak yang berdatangan di gedung dewan jalan Yos Sudarso. Semakin lama PKL yang datang semakin banyak yang berdatangan. Kira-kira pukul 08.00 WIB, di halaman gedung dewan sudah berkumpul sebanyak 200 orang PKL yang berdemo. Pada saat 08.00 WIB,

perwakilan PKL diminta masuk dan naik ke lantai II tempat ruang rapat. Demo ke DPRD yang ke II tetap di terima di ruang rapat lantai II.

Negoisasi dalam demo kali ini tidak saja dihadiri oleh kalangan anggota dewan tetapi juga dihadiri kalangan eksekutif pemerintah kota Surabaya. Dari kalangan DPRD diwakili oleh Pak Herman Rifai, sementara dari kalangan pemerintah kota Surabaya yang datang adalah Pak Kadri Kusuma dan Pak Umar. Keduanya berasal dari Dispol PP kota Surabaya. Sementara itu dari Bagian Perekonomian diwakili oleh Pak Witarko. Sementara itu dari kalangan PKL diwakili oleh Pak Ponimin, Pak Rifai, Pak Marno dan Pak Kirman. Perwakilan PKL mengadakan rapat dengan eksekutif dan legislatif di gedung dewan ini mulai dari pukul 08.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Posisi duduk dalam ruangan rapat kali ini berbeda dengan demo saat sebelumnya. Posisi duduk PKL berada di deretan kursi yang berada paling belakang (sebelah Selatan). Sementara deretan kursi yang berada di depannya (sebelah Utaranya, dekat dengan meja lonjong yang berada di bagian tengah) ditempati perwakilan dari pemerintah kota Surabaya, yaitu Pak Kadri, Pak Umar dan Pak Witarko. Hasil dari pertemuan kali ini menghasilkan kesepakatan yang intinya ex PKL diperbolehkan lagi di berjualan Taman Surya pada hari Sabtu dan Minggu. Waktu itu kalangan DPRD juga menyetujui bahwa PKL kembali berjualan di Taman Surya tetapi untuk hari Sabtu dan Minggu. Tetapi di kalangan ex PKL terjadi perbedaan pendapat antara yang menerima berjualan di Taman Surya pada hari Sabtu dan Minggu dengan yang meminta berjualan tiap

hari. Sebagian tetap menghendaki berjualan terus setiap malam di Taman Surya. Tetapi sebagian lagi menerima usulan berjualan pada hari Sabtu dan Minggu. Karena perbedaan ini --belum sepakat -- maka akhirnya ex PKL belum menempati Taman Surya.

Kepastian diperbolehkan atau tidak berjualan lagi di Taman Surya masih mengambang. Karena itu ex PKL Taman Surya kembali melakukan demonstrasi ke gedung DPRD kota Surabaya. Seperti pada demo-demo sebelumnya, PKL sudah berkumpul di gedung DPRD kota Surabaya sejak pukul 07.00 pagi hari-hingga pukul 13.00 WIB. Seperti demo-demo sebelumnya, diantara PKL banyak yang membawa pamlet dari kertas karton atau spanduk. Demo kali ini diterima oleh kalangan Dewan yang lebih banyak dari demo-demo sebelumnya. Kalau pada demo-demi sebelumnya hanya diterima oleh Pak Herman Rifai. Tetapi demo yang ketiga ini diterima oleh kalangan DPRD tidak hanya satu partai tetapi lebih dari satu partani. Pada waktu demo kali ini dari pihak DPRD turut menemui adalah PDIP, PKB, Golkar. Saat itu yang hadir dari DPRD kota Surabaya antara lain Pak Gatot Sujito dan Pak Arief Indriyanto. Setelah melalui perdebatan yang sengit, masih belum ada keputusan yang pasti. Sikap kalangan DPRD pada intinya menyetujui bahwa PKL kembali ke Taman Surya. Tetapi keputusan akhirnya ada di kalangan eksekutif, akhirnya PKL belum mendapat kepastian untuk kembali ke Taman Surya.

Keinginan para PKL kembali ke Taman Surya dan berjualan setiap seperti sebelumnya tidak dikabulkan pemerintah kota Surabaya. Tawaran pemerintah

kota Surabaya yang masih mengizinkan berjualan pada hari Sabtu dan Minggu ditolak mentah-mentah oleh kalangan PKL. Para PKL tetap bersikeras meminta kembali ke Taman Surya dan berjualan setiap hari seperti sebelum diusir.

Kengototan PKL kembali ke Taman Surya dan berjualan setiap hari tidak dapat mendorong pemerintah kota mencabut larangannya. Keputusan pemerintah kota tetap seperti semula bahwa Taman Surya harus tetap steril dari para PKL. Tawaran dari pemerintah kota Surabaya, yang semula mengizinkan PKL berjualan pada hari Sabtu dan Minggu akhirnya justru dicabut. Sejak saat itu praktis PKL tidak lagi memiliki alternatif pilihan kecuali harus menyingkir dari Taman Surya. Kebijakan pemerintah kota Surabaya yang melarang Taman Surya dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli tidak hanya PKL yang menjadi korbannya. Tetapi pejabat dari pemerintah kota Surabaya yang menawarkan PKL tetap dapat berjualan pada hari Sabtu dan Minggu akhirnya juga dicopot/dimutasi.

Kedua: demonstrasi dengan kekerasan. Ketika pemerintah kota tidak mentolelir lagi ex PKL berjualan di Taman Surya, aksi perlawanan terus dilakukan. Pasca dilarangnya secara total kembali ke taman Surya, kalangan PKL tercatat melakukan demonstrasi sebanyak empat kali. Tempat yang menjadi sasaran demonstrasi tidak ke DPRD kota Surabaya tetapi ke pemerintah kota Surabaya. Pada saat demonstrasi ke pemerintah kota Surabaya inilah ex PKL bertindak anarkhis. Tempat kantor pemerintah kota Surabaya menyatu dengan Taman Surya merupakan alasan tersendiri kenapa ex PKL sampai bertindak

anarkhis dengan cara merobohkan pintu pagar. Tindakan merobohkan pintu pagar ini sebenarnya tanpa ada perencanaan seperti demonstrasi yang dilakukan ke DPRD kota Surabaya. Tindakan merobohkan pagar Taman Surya terjadi secara spontan.

Ketika ex PKL akan berdemo ke Walikota Surabaya sampai di depan pintu gerbang Taman Surya ternyata sudah ditutup oleh petugas pemerintah kota Surabaya. Begitu melihat pintu gerbang Taman Surya ditutup, di kalangan ex PKL terlihat gusar. Sebagian PKL ada yang menggoyang-goyangkan pintu pagar Taman Surya. Ketika sebagian ex PKL menggoyangkan pintu pagar ternyata menarik perhatian sesamanya dan ikut-ikutan. Praktis di sepanjang sisi pintu pagar bagian atas berderet tangan para ex PKL yang bergerak bersama mengayun-ayunkan ke arah Timur dan Barat berulang kali. Semakin lama gerakan tangan menggoyang-goyangkan pintu pagar Taman Surya semakin keras. Tiba-tiba terdengar bunyi krak, dan pintu pagar Taman Surya miring ke arah Barat --bagian dalam Taman Surya--. Beberapa saat kemudian pintu pagar roboh ke arah dalam Taman Surya. Di tengah robohnya pintu pagar terdengar suara teriakan dari para ex PKL yang sejak tadi berusaha merobohkannya. Kendati pintu pagar sudah roboh, para ex PKL Taman Surya tetap tidak bisa masuk, karena dijaga aparat dari Dispol PP.

Kendati pintu pagar dapat dirobohkan secara paksa, ex PKL Taman Surya belum dapat kembali menempati dan berjualan. Di Taman Surya tetap dijaga oleh aparat dari Satpol PP. Robohnya pagar Taman Surya yang sekaligus pagar

kantor walikota kota Surabaya tidak menjadi penyebab berubahnya kebijakan pemerintah kota. Pemerintah kota Surabaya tetap pada kebijakannya bahwa PKL harus keluar dari Taman Surya.

Uraian pada sub bab ini pada dasarnya menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perlawanan yang dibangun PKL Taman Surya ada tiga. Ketika bentuk perlawanan itu adalah "perlawanan belas kasihan", demonstrasi dan demonstrasi dengan kekerasan. Perlawanan yang dibangun PKL dengan berbagai bentuk ternyata tidak membuahkan hasil. Perlawanan yang dibangun PKL dapat dipatahkan oleh pemerintah kota Surabaya. Tujuan PKL ingin kembali ke Taman Surya akhirnya gagal total.*

Bab 6 **Kategori Teori** **(Implikasi Teoritik)**

Studi ini mendasarkan pada teori perlawanan dari James Scott yang menggunakan teori moral ekonomi, teori ekonomi politik dari Samuel Popkin dan teori perlawanan terselubung dari Hotman Siahaan. Dalam bab ini mencoba menempatkan fenomena perlawanan yang dibangun ex. PKL Taman Surya Surabaya dan mendialogkan temuan-temuan dengan ketiga teori tersebut. Apa yang dilakukan --sekecil apapun usaha yang dilakukan dalam studi ini-- untuk mencari posisi perlawanan yang dibangun ex PKL Taman Surya merupakan bagian dari sumbangan pemikiran dalam khasanah perdebatan teori-teori yang telah ada. Apa yang ditemukan dalam studi ini kiranya menjadi bagian dari perbincangan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kalangan marginal.

Menurut Scott perlawanan yang dibangun merupakan reaksi terhadap ancaman subsistensi yang terjadi. Perlawanan merupakan tindakan defensif terhadap penetrasi kapital yang memasuki kehidupan masyarakat. Masuknya kapital dalam kehidupan petani dianggap sebagai ancaman terhadap sendi-sendi sosial maupun budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupannya. Kapital yang masuk mengakibatkan terjadinya proletarisasi yaitu kehilangan akses terhadap alat-alat produksi, marginalisasi, yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Menghadapi situasi ancaman dalam kehidupannya, maka perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) merupakan reaksi

terhadap apa yang disebut Scott sebagai bentuk penindasan sehari-hari (*everyday forms of repression*) (Scott, 2000:321).

Seperti telah uraikan di bagian terdahulu, konsep perlawanan yang dikemukakan Scott pada masyarakat petani terutama kalangan petani miskin, diadaptasikan untuk melihat perlawanan ex PKL di perkotaan, dalam studi ini kasus ex PKL Taman Surya. Diasumsikan ex PKL di perkotaan khususnya yang telah terusir dari Taman Surya memiliki kesamaan dalam konteks sebagai kelompok masyarakat yang termarginalkan, khususnya dalam hal pekerjaan. Temuan Scott di Sedaka Malaysia, petani miskin/buruh tani berhadapan dengan petani kaya (bermodal) yang melakukan komersialisasi pertanian. Sehingga banyak pekerjaan yang sebelumnya/biasanya dapat dikerjakan petani miskin/buruh tani telah berubah digantikan dengan mesin-mesin. Dalam konteks ini maka petani miskin/buruh tani berada pada posisi yang termarginalkan dari pekerjaannya.

Sementara itu dalam konteks ini temuan Scott memiliki kesamaan dengan yang dialami ex. PKL Taman Surya, yaitu kehilangan pekerjaan. Hanya saja pihak yang memarginalkan PKL dari pekerjaannya bukanlah dari PKL yang lebih kaya atau bermodal ---seperti dalam konteks petani miskin/buruh tani oleh petani kaya---. Ex PKL Taman Surya kehilangan tempat mengais rejeki --terutama dalam jangka pendek karena setelah tidak lagi berjualan di Taman Surya untuk beberapa saat kemudian belum mendapat tempat lagi— justru oleh tekanan kebijakan pemerintah kota bukan oleh sesama PKL yang lebih kaya.

Campur tangan pemerintah (birokrasi) yang mengakibatkan baik ex PKL Taman Surya maupun petani (temuan Scott) termarginalkan memiliki kesamaan. Tetapi rentetan peristiwa sehingga menjadi marginal memiliki perbedaan. Temuan Scott bahwa petani yang termarginalkan bukan dilakukan oleh birokrasi/pemerintah *an sich* (semata) dengan tekanan kebijakan atau kekuatan kekuasaannya. Temuan Scott, menggambarkan bahwa petani (miskin) termarginalkan bukan saja disebabkan secara langsung oleh negara tetapi sebagai juga akibat petani kaya yang mengadopsi atau menjadi agen perubahan yang dikehendaki oleh pemerintah/negara. Dalam konteks ini maka peran pemerintah tidak secara langsung menjadikan petani kehilangan pekerjaannya atau berkurang pendapatannya. Tetapi peran petani kaya yang menerima program modernisasi pertanian menjadi faktor pemercepat proses terjadinya marginalisasi.

Sementara itu temuan Siahaan dalam studinya tentang Pembangkangan Terselubung Petani TRI di Papar Kediri, memiliki kesamaan dengan temuan studi ini, yaitu peran pemerintah secara langsung mengakibatkan petani maupun PKL tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima kebijakan pemerintah melalui program-programnya. Di kalangan petani di Papar Kediri, pemerintah melaksanakan program penanaman tebu di kalangan petani. Sementara itu dalam konteks ex PKL Taman Surya, pemerintah kota Surabaya melaksanakan program pengembalian fungsi taman sebagai fasilitas publik. Kedua kelompok masyarakat --petani di Papar Kediri dan PKL Taman Surya-- tidak dapat

mengelak dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah (negara). Kendati demikian, temuan Scott, Siahaan dan studi ini dalam satu sisi memiliki kesamaan dalam konteks keterpaksaan masyarakat –petani dan PKL—menerima kebijakan pemerintah (negara). Perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya terhadap pemerintah kota Surabaya dapat disebut sebagai pilihan perlawanan *imperative*, (*imperative* dalam bahasa Inggris dapat berarti: tidak boleh tidak). Pilihan yang disebut *imperative* adalah sebuah pilihan yang tidak ada alternatif lainnya. Bagi ex PKL Taman Surya pilihan melakukan perlawanan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan baru maka satu-satunya cara adalah melakukan perlawanan untuk mempertahankan Taman Surya sebagai tempat mengais rejeki.

Teori Scott tentang moral ekonomi melihat keamanan ekonomi merupakan aspek penting, karena petani hidup berada di ambang batas garis kemiskinan. Sedikit mengalami penurunan penghasilan maka dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidupnya. Moralitas “dahulukan selamat” menjadi kata kunci pembuka oleh teori moral ekonomi dalam menjelaskan gerakan perlawanan petani. Prinsip “dahulukan selamat” yang melekat pada petani memberi kekuatan yang amat berarti sehingga tidak hanya dapat menolak perubahan yang akan berdampak pada kehidupannya, tetapi juga akan melakukan perlawanan manakala dihadapkan pada kenyataan yang tidak ada alternatif lainnya. Hanya saja perlawanan yang ditemukan Scott di kalangan petani dalam bentuk yang tidak terbuka, atau dengan kata lain melawan tetapi

tetap berada dalam sistem yang ada. Sementara itu perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman tidak memungkinkan dilakukan dalam sistem yang ada. Perlawanan dilakukan karena ex PKL justru harus keluar dari sistem, bukan bagaimana menyiasati didalamnya dan tetap bertahan.

Dilihat dari perspektif moral ekonomi, perlawanan yang dibangun ex PKL tidak dapat di jangkanya. Perlawanan yang dilakukan ex PKL bukan disebabkan oleh adanya ancaman kapital yang memasuki kehidupannya, seperti halnya temuan Scott. Menurut Scott, kapital yang masuk dalam kehidupan masyarakat merupakan ancaman terhadap sendi-sendi sosial, maupun budaya yang telah tumbuh dan menjadi dasar berinteraksi. Tetapi dalam studi ini, masuknya kapital --pedagang lain yang lebih banyak mempunyai modal-- bukan merupakan ancaman bagi PKL. Tetapi sebaliknya adanya PKL lain yang lebih bermodal --baik dengan jenis barang dagangan yang sama ataupun tidak-- justru dianggap sebagai "berkah" karena dianggap dapat semakin menarik calon pembeli untuk datang. Sesama PKL tidaklah saling bersaing untuk memperebutkan pembeli. Seperti temuan Geertz, bahwa di pasar tradisional yang terjadi bukan persaingan antar-sesama pedagang tetapi antara penjual dengan calon pembelinya. Studi ini juga menemukan bahwa persaingan terjadi bukan sesama PKL tetapi antara penjual (PKL) dengan calon pembeli.

Scott menemukan bahwa perlawanan terjadi dalam situasi norma-norma sosial yang rekat, masih membudaya sehingga menjadi nilai dasar setiap perilaku. Sementara itu Siahhan melihat bahwa asumsi dari teori moral ekonomi

Scott yang mendasarkan pada moralitas tradisional ternyata tidak ditemui dalam pembangkangan terselubung. Pembangkangan terselubung justru hadir dan menjadi pilihan petani TRI dalam konteks lemahnya komunitas, nilai-nilai sosial dan tradisi-tradisi sosial desa. Perlawanan terselubung yang dipilih petani TRI justru muncul di tengah komunitas yang semakin memudar bahkan makin tergerusnya ikatan-ikatan patron klien. Selain itu pembangkangan terselubung muncul sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi dalam konteks cairnya nilai-nilai etika subsistensi dalam komunitas petani dan semakin meluasnya komersialisasi.

Tetapi studi ini menemukan situasi yang berbeda dengan apa yang ditemukan Scott maupun Siahaan. Pelawanan yang dilakukan ex PKL justru terjadi pada saat terbentuknya ikatan-ikatan sosial diantara mereka (PKL). Apalagi bagi PKL yang sama-sama dari daerah pedesaan dan di kota memiliki kesamaan pekerjaan merupakan dasar-dasar terbentuknya ikatan-ikatan sosial sesama mereka. Studi ini menemukan bahwa diantara para PKL yang berasal dari berbagai daerah --kemungkinan besar memiliki latar belakang sosio-kultural yang berbeda-- membangun norma-norma baru diantara mereka yang berfungsi untuk membangun jaringan sosial diantara mereka. Tetapi bangunan ikatan sosial di kalangan PKL dalam studi ini masih rapuh atau tidak kuat. Ikatan yang terjadi bukan didasarkan pada pertalian ideologis sehingga sangat mengakar. Ikatan yang terjadi didasarkan pada kesamaan tujuan untuk mencari pendapatan semata dengan cara berjualan. Diantara PKL Taman Surya belum terbentuk

ikatan yang sangat kuat sehingga mampu menjaga rasa kesatuan diantara mereka.

Karena itu perlawanan yang dibangun ex PKL bukan pada tataran ideologis seperti ditemukan Scott di Sedaka. Temuan ini sejalan dengan studi Siahaan tentang pembangkangan terselubung di kalangan petani TRI bahwa perlawanan bukanlah dalam konteks ideologis sebagaimana digambarkan oleh Scott dalam perlawanan sehari-hari. Pembangkangan terselubung hampir tak pernah memiliki serangkaian kesadaran ideologis dalam pengertian melakukan serangan verbal, tapi lebih bersifat material demi mempertahankan keamanan subsistensinya (Siahaan, 1996:25). Ikatan PKL yang hanya sebatas untuk mempertahankan tempat berjualan –hanya demi mempertahankan keamanan subsistensinya dalam istilah Siahaan– bukan ideologis mengakibatkan perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya rawan adanya potensi konflik internal yang mengancam rasa kebersamaannya. Ketika pemerintah kota akan merelokasi PKL ke THR, kalangan PKL akhirnya terbelah dalam menyikapinya, ada yang setuju dipindah sementara sebagian lainnya menolak.

Perhitungan rasional seperti temuan Popkin dalam satu sisi dapat ditemukan pada PKL Taman Surya. Dengan menggunakan konsep pilihan individu dan pembuatan keputusan, maka dapat membahas bagaimana dan mengapa kelompok individu memutuskan mengambil rangkaian norma-norma sambil menolak norma lainnya (Popkin, 1976:17). Pilihan rasional terlihat pada kelompok PKL yang akhirnya dapat menerima rencana relokasi. Bagi mereka --

yang menerima relokasi-- menyadari bahwa mempertahankan Taman Surya adalah merupakan kemustahilan. Sementara jika menerima relokasi PKL dapat menagih janji-janji pemerintah kota yang akan memberikan bantuan modal atau tetap dapat berjualan di tempat lain di wilayah kota Surabaya.

Popkin mengajukan pandangan bahwa petani sebagai penyelesaian persoalan yang rasional, menurut kepentingannya dan kebutuhan akan tawar-menawar bersama dengan yang lain untuk mencapai hasil akhir saling menguntungkan (Popkin, 1976: ix) Sementara itu pilihan yang diambil ex PKL menerima relokasi atau tidak inipun didasarkan pada keputusan yang bersifat pribadi, bukan karena dorongan oleh kelompok. Ketika menerima dipindah, ternyata tidak sedikit PKL yang "ingkar janji" dengan tetap berjualan di THR. Diantara PKL akhirnya cukup banyak yang tidak menempati THR tetapi kembali berjualan di jalan-jalan, pasar atau ikut bazaar keliling.

Kendati demikian teori pilihan rasional Popkin tidak sepenuhnya dapat ditemukan dalam kasus perlawanan ex PKL Taman Surya. Ketika melakukan perlawanan terhadap pemerintah kota, tidak semua ex PKL didasari oleh kalkulasi rasional yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya lebih banyak didasari oleh pilihan yang bersifat coba-coba. Siapa tahu dengan melakukan perlawanan akhirnya pemerintah kota mengalah dan memberi kebebasan pada PKL berjualan kembali di Taman Surya. Tidak sedikit diantara ex PKL yang terlibat melakukan perlawanan didasari oleh pertimbangan moral, yaitu *sungkan* sesamanya. Kekhawatiran akan dicemooh oleh ex PKL dengan label tidak

“solider” sesamanya justru merupakan dorongan lain ikut terlibat melakukan aksi perlawanan.

Rasa sungkan sehingga tetap mendukung perlawanan yang dilakukan sesama PKL, akhirnya menimbulkan dukungan yang semu. Agar tetap dianggap memiliki komitmen sesama PKL yang sedang melakukan perlawanan, maka PKL yang seperti ini tetap ikut datang terlibat langsung melakukan perlawanan. Hanya saja keberadaannya di tempat perlawanan posisinya berada paling belakang sambil bergurau sesama PKL bahkan tak jarang diselingi tawa lebar. Apa yang dilakukan juga bukan dukungan bersifat verbal terhadap perlawanan seperti berteriak-teriak sesuai dengan apa yang sedang diperjuangkan atau menjadi tuntutan. Tetapi lebih banyak menjadi penonton terhadap teman-temannya yang sedang melakukan perlawanan.

Bentuk-bentuk perlawanan dalam studi ini juga berbeda dengan temuan Scott. Scott menemukan bahwa perlawanan yang dibangun adalah tetap hidup dalam sistem yang ada dengan cara melawan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi perlawanan ex PKL Taman Surya tidak memungkinkan dengan cara sembunyi-sembunyi. PKL Taman Surya tidak memungkinkan akan hidup dalam sistem yang telah ada (pelarangan berjualan di Taman Surya). Menghadapi situasi yang dihadapi dalam kehidupannya, maka perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) seperti yang disebut Scott sebagai reaksi dari bentuk penindasan sehari-hari (*everyday forms of repression*) (Scott, 2000:321) tidak ditemukan dalam perlawanan ex PKL Taman Surya. Latar belakang prinsip “dahulukan

selamat" ikut juga mewarnai tujuan perlawanan yang ditemukan Scott. Menurut Scott tujuan perlawanan umumnya bukanlah untuk menumbangkan atau mengubah suatu sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup --hari ini, minggu ini, musim ini-- di dalamnya (Scott, 1993:329). Dengan istilah lain, Eric Hobsbawn mengungkapkan, sebagaimana di kutip Scott melihat perlawanan bertujuan bekerja dalam sistem dengan kerugian sedikit mungkin (Scott, 1993:330).

Di kalangan ex PKL Taman Surya bukanlah perlawanan sehari-hari dengan mengambil bentuk perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Perlawanan ex PKL Taman Surya bukan karena disebabkan karena kekhawatiran akan tersisih atau termarginalkan. Ex PKL memang sudah lahan untuk berjualan, yang berarti kehilangan pekerjaan. Ex PKL Taman Surya sudah pada posisi yang termarginalkan (kehilangan tempat berjualan). Perlawanan yang dibangun adalah untuk merebut kembali kesempatan yang telah hilang. Karena itu perlawanan ex PKL Taman Surya bukan bertujuan hidup dalam sistem yang ada. Tetapi perlawanan ex PKL Taman Surya mempertaruhkan kalah atau menang, bukan hidup dalam sistem --karena sistem tidak memungkinkan--. Perlawanan yang dipilih ex PKL Taman Surya justru secara terbuka melakukan demo, lobi atau membangun jaringan sosial dengan anggota masyarakat lainnya seperti kyai, anggota DPRD, bahkan LSM.

Karena itu perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya bukan mengambil prinsip seperti yang di kemukakan Scott, yaitu dengan prinsip

"dahulukan selamat" . Ex PKL Taman Surya justru melakukan perlawanan dalam bentuk konfrontasi besar-besaran dan menantang. Bentuk perlawanan ini berbeda dengan temuan Scott yang lebih memilih menghindarkan diri secara diam-diam yang juga tidak kurang besarnya dan seringkali jauh lebih efektif (Scott, 2000:43). Lebih lanjut Scott menjelaskan bahwa bentuk perlawanan petani tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif tetapi mengambil bentuk secara pasif, sabotase secara halus, menghindarkan diri dan tipu menipu. Selain itu bentuk-bentuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang relatif tidak berdaya antara lain mengambil makanan, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat dari belakang, membakar, atau melakukan sabotase (Scott, 2000:43). Bentuk-bentuk perlawanan seperti itu justru tidak ditemukan dalam kasus perlawanan ex PKL Taman Surya.

Dalam konteks organisasi, pikiran Popkin tidak menjangkau karakteristik individu-individu atau ex PKL yang ada di dalamnya. Pikiran Popkin berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa manusia adalah memiliki kesadaran pribadi, maka pada gilirannya petani juga mempunyai mentalitas kepemilikan pribadi. Menurut Popkin organisasi tradisional, semuanya ditandai dengan keuntungan pribadi untuk masing-masing anggota kelompok. Popkin melihat bahwa tak satu pun organisasi bersifat sosial, yaitu keuntungan bersama bagi semua kelompok atau masyarakat. Dalam batas ini maka apa yang diungkapkan Popkin bertolak belakang dengan temuan dalam studi ini. Perlawanan yang

dilakukan ex PKL Taman Surya terjadi justru dibawah kendali kelompok. Apa yang dilakukan ex PKL Taman Surya melalui kelompok, hasilnya bukan hanya untuk dinikmati oleh satu, dua atau kelompok tertentu. Tetapi apabila perlawanan berhasil maka akan dinikmati oleh semua PKL.

Teori ekonomi politik Popkin juga menguraikan bahwa tidak perlu bertindak demi kepentingan kelompok atau umum di masa mendatang. Karena manusia sering memilih kepentingan individu di atas kepentingan umum. Oleh sebab itu terdapat kecenderungan adaptasi tingkat individu terhadap persoalan umum bilamana satu-satunya hasil tindakan kelompok untuk keuntungan umum bagi keluruhan kelompok atau masyarakat. Sepanjang satu-satunya hasil kontribusi untuk tujuan umum adalah keuntungan bersama, maka seseorang meninggalkan kontribusinya dan menghabiskan sumber dayanya dalam cara lain. Dalam tataran inipun apa yang dikemukakan Popkin tidak ditemukan pada perlawanan ex PKL Taman Surya. Karena apa yang sedang dilakukan dengan cara melawan terhadap pemerintah kota, bagi pelakunya yang terlibat dapat dikatakan malah rugi. Tindakan kolektif memerlukan lebih banyak konsensus, sehingga memerlukan kondisi bahwa petani mencarinya dalam kepentingan individunya agar dapat mengalokasikan sumber daya demi kepentingan bersama mereka (Popkin, 1976: 225).

Dilihat dari kalkulasi rasional ekonomi bagi pelakunya maka perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya justru merugikan. Di satu sisi pemerintah kota memiliki perda yang mendasari kenapa PKL harus keluar dari Taman Surya,

karenanya kemungkinan besar atau justru tidak mungkin akan mengendurkan rencana memfungsikan kembali sebagai taman kota. Sementara di sisi lain para PKL selama terlibat melakukan perlawanan, berarti selama itu pula tidak dapat bekerja atau berjualan. Ketika melakukan perlawanan berarti tidak dapat memperoleh pendapatan. Sebaliknya selama melakukan perlawanan diperlukan logistik seperti makanan atau minuman untuk mendukungnya. PKL yang terlibat melakukan perlawanan secara swadaya menyediakan logistiknya secara mandiri. Maka terlihat bahwa ketika ex PKL ikut aktif melakukan perlawanan, ex PKL tidak bekerja yang berarti tidak mendapatkan pemasukan pendapatan. Sementara itu ditambah lagi harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menopang perlawanan yang dilakukan.

Sementara itu jika dilihat dari konteks kepemimpinan, apa yang dikatakan Popkin tidak ditemukan pada perlawanan ex PKL Taman Surya. Menjadi pemimpin kelompok ex PKL tidak dibutuhkan apa yang disebut sebagai *political entrepreneurs*. Karena di kalangan ex PKL, keterlibatannya bukan didasari oleh rasionalitas perhitungan untung rugi, tetapi lebih banyak didasari oleh sikap yang *ambigu*. *Ambigu* dalam arti ikut terlibat atau tidak dalam kelompok sebenarnya tidak menjadi soal penting. Bagi ex PKL yang penting adalah dapat menjaga kelangsungan dalam berjualan. Karena itu keterlibatannya dalam perlawanan sebenarnya lebih merupakan "*free rider*" (penumpang gelap). Keterlibatannya dalam perlawanan bukan karena perhitungan untung rugi tetapi karena dimobilisasi. Karena itu teori pilihan rasional dengan demikian tidak dapat

dimasukkan bagi mereka yang memiliki solidaritas kelompok, komiteman moral kepada kelompok, dan nilai-nilai non rasional lainnya yang dapat memobilisasi rakyat untuk bertindak lepas dari kepentingan pribadi. Dalam kenyataannya apa yang rasional bagi individu tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan-pilihan yang memberi inspirasi kelompok baik secara politik maupun budaya (Eckstein, 1989:4)

Menurut asumsi Popkin, gerakan hanya bisa dilakukan dengan bantuan organisasi dari luar desa ternyata bertolak belakang dengan temuan studi ini. Kendati telah ada bantuan organisasi dari luar ternyata perlawanan ex PKL Taman Surya tetap menuai kegagalan. Bantuan dari luar dalam perlawanan ex PKL Taman Surya tidak hanya dari organisasi tetapi juga tokoh masyarakat, partai politik dan agama. Temuan studi ini sejalan dengan temuan Siahaan dalam studinya, bahwa konteks politis (bantuan dari organisasi luar desa) ternyata tidak ada dalam pembangkangan terselubung.*****

Bab 7

Penutup:

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Keberadaan PKL di Taman Surya sejak tahun 1980-an. Tetapi, yang jelas sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah dan pemerintah disibukkan menata kembali imbas reformasi, maka sejak itu pula kawasan Taman Surya mulai dipadati oleh pendatang-pendatang baru: para PKL yang pada awalnya memang ditoleransi pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan. Di tengah keterbatasan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan kelesuan perekonomian nasional, usaha warga masyarakat untuk bertahan hidup lewat usaha-usaha kecil seperti PKL mau tidak mau harus dihargai atau minimal ditoleransi.

Pada awal-awal sebelum Taman Surya berubah menjadi ramai PKL, para pedagang yang berjualan di Taman Surya memperoleh lahan tempat berjualan dengan cara cuma-cuma baik diberi kerabat, teman atau sesama PKL yang sebelumnya telah menggelar dagangannya. Sementara itu ketika tahun 2001, PKL di Taman Surya mulai membludak sehingga agak kesulitan mencari lahan untuk berjualan. Tetapi karena adanya jaringan sosial diantara PKL, maka tak jarang antara satu dengan lainnya memberi lokasi untuk berjualan. Bagi mereka yang tidak memiliki akses pedagang sebelumnya maka memperoleh tempat usaha

tidak secara cuma-cuma. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ada PKL yang mengaku memperoleh tempat usahanya dengan cara membeli dari pihak lain.

Karena jumlah PKL di Taman Surya semakin membludak sehingga sulit mengendalikan. Ketika terjadi peralihan kepemimpinan kota Surabaya dari walikota Purnomo Kasidi ke Soenarto Sumoprawiro (Cak Narto) sempat ada pelarangan PKL berjualan di Taman Surya. Atau dengan kata lain, pada awal Cak Narto menjadi walikota Surabaya, sempat melarang PKL menempati dan berjualan di Taman Surya.

PKL yang berada di Taman Surya pertama kali melakukan unjuk rasa ketika walikota dipimpin Cak Narto. Pada saat itu Cak Narto melarang para PKL berjualan di Taman Surya. Karena larangan ini kemudian menyangkut PKL yang notebene termasuk juga kalangan bawah atau miskin akhirnya juga memancing untuk bereaksi dengan cara mendatangi rumah dinas walikota

Dorongan PKL bereaksi melakukan perlawanan pada dasarnya disebabkan oleh pemerintah kota Surabaya melarang aktivitas berjualan di Taman Surya. Larangan bagi PKL berjualan di Taman Surya merupakan penyebab yang kuat melakukan perlawanan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Seperti diketahui para PKL mengandalkan pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya dari berjualan di Taman Surya. Memang bagi PKL

dapat saja mencari di tempat lain untuk berjualan, tetapi berjualan di Taman Surya telah dirasakan sangat menguntungkan.

Selain itu perlakuan tidak adil terhadap PKL —yang dituduh merusak tanaman di Taman Surya— merupakan penyebab lain melakukan perlawanan. Dijadikan “kambing hitam” oleh pemerintah kota, bahwa PKL yang menjadi penyebab rusaknya tanaman di Taman Surya merupakan pendorong lainnya melakukan perlawanan. Pengalaman yang sama di kalangan PKL merupakan energi yang menyatukan perlawanan terhadap pemerintah kota.

Para ex PKL Taman Surya telah mencoba mempersiapkan diri melakukan perlawanan dengan membangun jaringan sosial baik ke internal PKL maupun ke pihak luar. Ketika melakukan perlawanan ke Cak Narto, para pedagang membangun jaringan sosial hanya sebatas kalangan internal PKL yang berada di Taman Surya. Pilihan jaringan sosial seperti ini, karena waktu itu situasi yang dihadapi masih dapat diatasi oleh PKL Taman Surya sendiri.

Ketika PKL Taman Surya sudah tidak bisa mengatasi persoalan yang dihadapi, maka berusaha membangun jaringan sosial yang bersifat eksternal. PKL Taman Surya mencoba membangun jaringan sosial ke pihak-pihak lain yang dianggap dapat membantu penyelesaian yang menguntungkan pihaknya. Ketika menghadapi program relokasi PKL ke THR, jaringan sosial yang pernah dibangun antara lain ke tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

Perlawanan PKL Taman Surya mempertahankan Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto maupun jalan Wijaya Kusuma (Komplek SMA) dilakukan secara terorganisir. Perlawanan ini dikoordinasi oleh kelompok ex PKL Taman Surya. Setiap akan melakukan perlawanan selalu didahului dengan merapatkan barisan melalui rapat persiapan pada malam hari sebelumnya.

Situasi Taman Surya yang dijaga secara ketat oleh Satpol PP menjadikan perlawanan yang bersifat individual baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tidak dilakukan oleh PKL. Sementara tekanan psikologis yang di sampaikan pemerintah kota Surabaya semakin menghilangkan alternatif pilihan bagi PKL untuk bertahan atau melawan. PKL mau tidak mau harus menerima program relokasi PKL ke THR. Bagi yang menolak harus menanggung konsekwensi tidak mendapat jatah stand di THR, sebaliknya harus mencari tempat sendiri.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dibangun PKL Taman Surya ada tiga. Ketiga bentuk perlawanan itu adalah "perlawanan belas kasihan", demonstrasi dan demontrasi dengan kekerasan. Perlawanan yang dibangun PKL dengan berbagai bentuk ternyata tidak membuahkan hasil. Perlawanan yang dibangun PKL dapat dipatahkan oleh pemerintah kota

Surabaya. Tujuan PKL ingin kembali ke Taman Surya akhirnya gagal total.

Studi ini menemukan bahwa ada kesamaan dengan studi Scott, yaitu sama-sama kehilangan pekerjaan. Sementara itu pihak yang memarjinalkan PKL dari pekerjaannya bukanlah dari PKL yang lebih kaya atau bermodal tetapi oleh oleh tekanan kebijakan pemerintah kota bukan oleh sesama PKL yang lebih kaya atau bermodal. Perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya bukan bertujuan untuk tetap berada di dalam sistem yang ada. Perlawanan dilakukan karena ex PKL justru harus keluar dari sistem, bukan bagaimana menyiasati didalamnya dan tetap bertahan.

Ex PKL Taman Surya tidak dapat mengelak dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah (negara). Karena itu perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya terhadap pemerintah kota Surabaya dapat disebut sebagai pilihan perlawanan *imperative*, (*imperative* dalam bahasa Inggris dapat berarti: tidak boleh tidak). Pilihan yang disebut *imperative* adalah sebuah pilihan yang tidak ada alternatif lainnya. Bagi ex PKL Taman Surya pilihan melakukan perlawanan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh.

Masuknya kapital —pedagang lain yang lebih banyak mempunyai modal— bukan merupakan ancaman bagi PKL. Tetapi sebaliknya adanya PKL lain yang lebih bermodal —baik dengan jenis barang dagangan yang

sama ataupun tidak-- justru dianggap sebagai "berkah" karena dianggap dapat semakin menarik calon pembeli untuk datang. Sesama PKL tidaklah saling bersaing untuk memperebutkan pembeli.

Pelawan yang dilakukan ex PKL justru terjadi pada saat terbentuknya ikatan-ikatan sosial diantara mereka (PKL). Studi ini menemukan bahwa diantara para PKL yang berasal dari berbagai daerah membangun norma-norma baru diantara mereka yang berfungsi untuk membangun jaringan sosial diantara mereka. Tetapi bangunan ikatan sosial di kalangan PKL dalam studi ini masih rapuh atau tidak kuat. Ikatan yang terjadi bukan didasarkan pada pertalian ideologis sehingga sangat mengakar. Ikatan yang terjadi didasarkan pada kesamaan tujuan untuk mencari pendapatan semata dengan cara berjualan. Ikatan PKL yang hanya sebatas untuk mempertahankan tempat berjualan --hanya demi mempertahankan keamanan subsistensinya dalam istilah Siahaan-- bukan ideologis mengakibatkan perlawanan yang dilakukan ex PKL Taman Surya rawan adanya potensi konflik internal yang mengancam rasa kebersamaannya.

Ketika melakukan perlawanan terhadap pemerintah kota, tidak semua ex PKL didasari oleh kalkulasi rasional yang menguntungkan bagi dirinya. Tidak sedikit diantara ex PKL yang terlibat melakukan perlawanan didasari oleh pertimbangan moral, yaitu *sungkan sesamanya*. Kekhawatiran akan dicemooh oleh ex PKL dengan label tidak "solider"

sesamanya justru merupakan dorongan lain ikut terlibat melakukan aksi perlawanan. Rasa sungkan sehingga tetap mendukung perlawanan yang dilakukan sesama PKL, akhirnya menimbulkan dukungan yang semu.

Menjadi pemimpin kelompok ex PKL tidak dibutuhkan apa yang disebut sebagai *political entrepreneurs*. Karena di kalangan ex PKL, keterlibatannya bukan didasari oleh rasionalitas perhitungan untung rugi, tetapi lebih banyak didasari oleh sikap yang *ambigu*. *Ambigu* dalam arti ikut terlibat atau tidak dalam kelompok sebenarnya tidak menjadi soal penting. Bagi ex PKL yang penting adalah dapat menjaga kelangsungan dalam berjualan. Karena itu keterlibatannya dalam perlawanan sebenarnya lebih merupakan "free rider" (penumpang gelap). Keterlibatannya dalam perlawanan bukan karena perhitungan untung rugi tetapi karena dimobilisasi.***

2. Saran.

Beberapa catatan yang dapat dianggap sebagai saran dari temuan-temuan studi ini adalah: Perlu adanya studi-studi lanjutan yang terkait dengan perlawanan di perkotaan. Apalagi sampai saat ini studi-studi tentang perlawanan di perkotaan masih terbatas. Kalau dibandingkan dengan studi-studi perlawanan di pedesaan maka studi perlawanan di perkotaan masih kalah banyak jumlahnya

Selain itu di perkotaan khususnya, apalagi pasca reformasi, keberanian masyarakat melakukan perlawanan jauh lebih tinggi dibanding pada era sebelumnya. Kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah akan mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat kota. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota berdampak kepentingan warganya. Karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota perlu melibatkan *stakeholder* yang ada

Karena itu kebijakan apapun harus mendasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan hanya sekedar mendasarkan pada Perda semata. Tidak menutup kemungkinan Perda yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Kebijakan apapun seharusnya mempertimbangkan tingkat perubahan masyarakat kota yang relatif cepat.

Di sisi lain keterbatasan pemerintah kota menyediakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor formal, seyogyanya menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai alternatif pekerjaan yang diakui keberadaannya di kota Surabaya. Pemerintah kota seyogyanya mau mengakui PKL sebagai bagian dari ekonomi kota. Karena itu pemerintah kota hendaknya menyadari dan mengakui bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh seiring dengan perkembangan kota.

Keberadaan PKL seharusnya tidak ditempatkan sebagai bagian dari permasalahan kota. Karena itu keberadaan PKL bukan untuk

dilenyapkan, tetapi ditata dengan sejumlah peraturan sehingga menjadi bagian dari keindahan atau kekhasan kota Surabaya. Selama substitusi yang dapat menggantikan PKL belum ada (lapangan pekerjaan lain belum ada) maka selama itu pula PKL tidak mungkin dihilangkan.

Kalau pemerintah kota memiliki kemauan serius yang kuat untuk menata PKL yang ada, maka PKL tidak mendatangkan masalah-masalah dikemudian hari. Sebaliknya penataan yang serius terhadap PKL merupakan potensi tersendiri baik dari keindahan maupun ekonomi perkotaan. Seperti PKL di lapangan KODAM V Brawijaya, adanya PKL ternyata tidak mengakibatkan adanya kekumuhan/kekotoran, tetapi tetap terjaga kebersihan.*****